

Katalog : 4102004.3273

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDUNG**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2019



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2019

ISSN	: -
Katalog BPS	: 4102004.3273
Nomor Publikasi	: 3273.1935
Ukuran Buku	: B5 (17,6 x 25 cm)
Jumlah Halaman	: xii + 72 halaman
Naskah	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Ilustrasi Sampul	: Kota Bandung
Diterbitkan oleh	: @Badan Pusat Statistik Kota Bandung
Dicetak oleh	: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANDUNG 2019

Tim Penyusun

Pengarah : Aris Budiyanto, S.ST, M.Si

Penanggung Jawab : Dra. Sri Sundari, MM

Naskah : 1. Rahmawaty, S.Si, ME
2. Susanti, S.TP

Pengolah Data : 1. Rahmawaty, S.Si, ME
2. Susanti, S.TP

Gambar Kulit, Desain dan *Layout* : Rahmawaty, S.Si, ME

Penyunting : Dra. Sri Sundari, MM

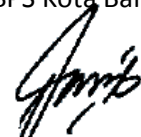
KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala karunia-Nya sehingga publikasi Indikator Statistik Kesejahteraan Tahun 2019 Kota Bandung berhasil disusun. Publikasi ini merupakan publikasi tahunan yang kami susun guna menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Bandung. Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Adapun sumber data untuk publikasi ini yaitu Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017-2018, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 dan Publikasi Proyeksi Penduduk 2010-2020 Provinsi Jawa Barat.

Publikasi ini mencakup indikator kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, taraf dan pola konsumsi serta indikator sosial lainnya di Kota Bandung.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Bandung, November 2019
Kepala BPS Kota Bandung,



Aris Budiwanto, S.ST, M.Si
NIP. 197403071995121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Ruang Lingkup.....	2
1.2 Sistematika.....	2
1.3 Sumber Data.....	2
1.4 Konsep dan Definisi.....	3
BAB II KEPENDUDUKAN.....	9
2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	10
2.2 Sebaran dan kepadatan penduduk.....	12
2.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan.....	14
2.4 Rata-rata Usia Perkawinan Pertama.....	17
2.5 Penggunaan Alat/Cara KB.....	19
BAB III KESEHATAN.....	21
3.1 Derajat dan Status Kesehatan.....	22
3.2 Pemanfaatan Tenaga Kesehatan.....	25
BAB IV PENDIDIKAN.....	31
4.1 Rata-rata Lama Sekolah.....	32
4.2 Status Pendidikan.....	36
4.3 Tingkat Partisipasi Sekolah.....	39
BAB V KETENAGAKERJAAN.....	43
5.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran.....	44
5.2 Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan.....	47

Daftar Isi

5.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	50
5.4. Sektor Formal dan Sektor Informal	53
Bab VI PERUMAHAN.....	57
6.1. Kualitas Rumah Tinggal	58
6.2. Fasilitas Rumah Tinggal	59
6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal	61
BAB VII TARAF DAN POLA KONSUMSI.....	63
7.1. Pengeluaran Rumah Tangga.....	63
7.2. Konsumsi Energi dan Protein	69
BAB VIII SOSIAL LAINNYA	71
8.1. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi	71
8.2. Akses Terhadap Layanan Keuangan	73

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 1 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT, TAHUN 2018 (RIBU jiwa)	11
GRAFIK 2 KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN KOTA BANDUNG, 2018 (JIWA PER KM ²)	13
GRAFIK 3 RASIO JENIS KELAMIN KOTA BANDUNG, 2014-2018	14
GRAFIK 4 PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN DAN UMUR PERKAWINAN PERTAMA, 2016-2018	18
GRAFIK 5 TREN UMUR HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR (TAHUN) DAN PERTUMBUHANNYA (%) DI KOTA BANDUNG, 2010 – 2018	23
GRAFIK 6 PERSENTASE PENDUDUK YANG MENDERITA SAKIT SEBULAN YANG LALU MENURUT JENIS KELAMIN, 2018	24
GRAFIK 7 PERSENTASE ANGKA KESAKITAN PENDUDUK KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT MENURUT JENIS KELAMIN, 2018	25
GRAFIK 8 PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGALAMI KELUHAN KESEHATAN DAN BEROBAT JALAN SELAMA SEBULAN TERAKHIR BERDASARKAN TEMPAT BEROBAT JALAN, 2018	29
GRAFIK 9 RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KOTA BANDUNG, TAHUN 2016-2018 (TAHUN).....	35
GRAFIK 10. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DI KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT,	36
GRAFIK 12 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KOTA BANDUNG MENURUT JENIS KELAMIN, 2015-2018 (PERSEN)	47
GRAFIK 14 PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SEMINGGU YANG LALU MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA DI KOTA BANDUNG, 2015-2018 (PERSEN)	50
GRAFIK 15 PERSENTASE PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA, 2018 (PERSEN)	52
GRAFIK 16 PENDUDUK 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT STATUS KEGIATAN FORMAL DAN INFORMAL DI KOTA BANDUNG, 2015 – 2018	54
GRAFIK 17 PERSENTASE PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL MENURUT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN DI KOTA BANDUNG, 2015 – 2018 (PERSEN)	55
GRAFIK 18 RATA-RATA PENGELUARAN MAKANAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA KOTA BANDUNG (RUPIAH), 2017 - 2018	66
GRAFIK 19 RATA-RATA PENGELUARAN NON MAKANAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT GOLONGAN PENGELUARAN PER KAPITA KOTA BANDUNG (RUPIAH), 2017 - 2018	67
GRAFIK 20 GINI RATIO KOTA BANDUNG DAN PROVINSI JAWA BARAT, 2014 - 2017	68
GRAFIK 21 RATA-RATA KONSUMSI KALORI DAN PROTEIN PER KAPITA SEHARI DI KOTA BANDUNG, 2016 - 2018	70
GRAFIK 22 PERSENTASE PENDUDUK 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGUASAI/MEMILIKI TELEPON SELULER DI KOTA BANDUNG TAHUN 2017-2018	72
GRAFIK 23 PERSENTASE JENIS KREDIT YANG DITERIMA OLEH RUMAH TANGGA DI KOTA BANDUNG (PERSEN), 2018	75

DAFTAR TABEL

TABEL 1 JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA BANDUNG, 2014-2018.....	12
TABEL 2 ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN DI KOTA BANDUNG, 2017-2018	16
TABEL 3 PERSENTASE PEREMPUAN PERNAH KAWIN BERUMUR 15-49 TAHUN MENURUT KARAKTERISTIK DAN STATUS PENGGUNAAN ALAT/CARA KB, 2018.....	20
TABEL 4 PERSENTASE PEREMPUAN UMUR 15-49 TAHUN YANG PERNAH KAWIN MENURUT PROSES KELAHIRAN TERAKHIR, 2016-2018	27
TABEL 5 PERSENTASE PEREMPUAN BERUMUR 15-49 TAHUN YANG PERNAH KAWIN YANG PERNAH MELAHIRKAN DALAM DUA TAHUN TERAKHIR MENURUT TEMPAT MELAHIRKAN ANAK LAHIR HIDUP YANG TERAKHIR, 2016-2018	28
TABEL 6 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (EYS) (TAHUN) DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (MYS) (TAHUN) DI KOTA BANDUNG, 2016 – 2018	33
TABEL 7 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH (EYS) (TAHUN) DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH (MYS) (TAHUN) DI KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT, 2016 – 2018.....	34
TABEL 8. PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 7-24 TAHUN KE ATAS MENURUT KARAKTERISTIK DAN STATUS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, 2017 DAN 2018	37
TABEL 9. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT USIA SEKOLAH DI KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT, 2017 DAN 2018 (PERSEN)	39
TABEL 10. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN DAN KELOMPOK UMUR DI KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT, 2018 (PERSEN)	40
TABEL 11. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG DAN JAWA BARAT, 2017 – 2018 (PERSEN)	41
TABEL 12 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KOTA BANDUNG MENURUT JENIS KELAMIN (PERSEN), 2015-2018.....	45
TABEL 13 RUMAH TANGGA MENURUT BEBERAPA INDIKATOR INDIKATOR KUALITAS PERUMAHAN, 2017 DAN 2018.....	58
TABEL 14 PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT BEBERAPA FASILITAS PERUMAHAN DI KOTA BANDUNG, TAHUN 2017 DAN 2018 (PERSEN)	60
TABEL 15 RUMAH TANGGA MENURUT STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL, 2017-2018.....	61
TABEL 16 RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DI KOTA BANDUNG, 2016 – 2018	64
TABEL 17 PERSENTASE ANGGOTA RUMAH TANGGA 5 TAHUN KE ATAS YANG MENGAkses INTERNET 3 BULAN TERAKHIR MENURUT JENIS KELAMIN DI KOTA BANDUNG, 2017-2018	73



BAB I PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan di Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan nasional yang dituangkan dalam rencana pembangunan yang pada akhirnya diimplementasikan dalam program-program pembangunan.

Dalam serangkaian konferensi Perserikatan bangsa Bangsa, Indonesia telah menyetujui untuk mengadopsi standar dan norma Internasional. Pendekatan terpadu sasaran-sasaran pembangunan yang lebih konkret, terukur dan kuantitatif secara universal tercantum dalam tujuan pembangunan yang teretus dalam SDGs (*Sustainable development Goals*). SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (hingga tahun 2030) guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh Negara (universal), sehingga seluruh Negara tanpa kecuali Negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs.

Salah satu informasi yang terkait dengan pembangunan yaitu gambaran keadaan masyarakat mengenai kehidupan sosial ekonominya. Rangkaian data statistik yang dapat merangkum keadaan sosial terdapat dalam indikator sosial. Oleh karena itu, ketersediaan indikator sosial dari suatu daerah sangat diperlukan untuk mengarahkan pembangunan agar tepat sasaran dan efisien.

Publikasi atau gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat ini diharapkan mampu memberikan gambaran sejauh mana perkembangan kesejahteraan penduduk yang telah dicapai, sebagai hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Isi Indikator Kesejahteraan Rakyat ini masih bersifat makro mengingat dimensi cakupan kesejahteraan



yang sedemikian luasnya. Namun demikian, publikasi ini diharapkan banyak membantu dalam analisis sosial ekonomi kesejahteraan penduduk di Kota Bandung.

1.1 Ruang Lingkup

Tingkat kesejahteraan rakyat meliputi kesejahteraan materil dan non materil. Kesejahteraan materil meliputi pendapatan, kepemilikan harta benda, termasuk keadaan fisik rumah tempat tinggal bersama fasilitasnya. Sedangkan kesejahteraan non materil meliputi keadaan pendidikan, kesehatan, kebersihan dan lain lain.

Pembahasan dalam publikasi ini, tidak saja yang bersifat materil tetapi juga yang bersifat non materil. Karena tidak semua aspek non materil dapat diukur, sehingga yang dibahas hanya masalah sosial dan demografi yang dapat diukur dan dianggap penting sebagai komponen yang dominan berpengaruh dalam menentukan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.

1.2 Sistematika

Indeks kesejahteraan Kota Bandung tahun 2019 ini terdiri dari 7 kelompok yakni Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Perumahan, Taraf dan Pola konsumsi , serta sosial lainnya yang digambarkan dalam table dan gambar/grafik beserta uraiannya yang disajikan secara terpisah dan dalam bab masing masing.

1.3 Sumber Data

Sumber data yang disajikan dalam pembuatan publikasi indikator statistik Kesejahteraan rakyat 2019 ini yaitu data sekunder hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 dan 2018 dan Survey angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018 yang dikumpulkan secara primer oleh petugas BPS.





1.4 Konsep dan Definisi

Rumah Tangga

Seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama dan makan satu dapur. Yang dimaksud makan satu dapur adalah jika pengurusan makan sehari harinya dikelola menjadi satu.

Kepala Rumah Tangga

Seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk oleh anggota rumah tangga bersangkutan sebagai kepala rumah tangga.

Anggota Rumah Tangga

Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah tangga waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih ,dianggap bukan sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang tinggal di rumah tangga kurang 6 bulan tetapi berniat pindah/bertempat tinggal di rumah tangga tersebut 6 bulan atau lebih dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Sekolah

Kegiatan bersekolah di sekolah formal (negeri dan swasta) baik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

Tidak/belum pernah sekolah

Mereka yang tidak mau atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat Taman Kanak kanak yang tidak melanjutkan ke SD.

Masih bersekolah

Mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar,menengah atau tinggi.



Tidak sekolah lagi

Mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan)

Jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari seluruh penduduk dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Keluhan Kesehatan

Keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau gangguan kejiwaan, baik karena karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, criminal atau hal lain.

Imunisasi

Memasukkan kuman penyakit yang sudah dimatikan kedalam tubuh anak balita dengan cara suntik atau minum dengan maksud agar terjadi kekebalan terhadap jenis penyakit tertentu pada tubuh.

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

Angkatan Kerja

Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan atau mencari pekerjaan.

Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.





Bekerja

Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit satu jam dalam seminggu. Bekerja dalam satu jam tersebut harus dilakukan berturut turut tidak terputus.

Jenis Pekerjaan

Macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang.

Lapangan Pekerjaan

Bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha /perusahaan/ instansi tempat seorang bekerja.

Status Pekerjaan

Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaannya.

Pekerjaan Utama

Pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak pada referensi waktu survey seminggu yang lalu dan bukan biasanya (*usually*)

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah dapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Mencari Pekerjaan

Kegiatan dari mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas.

Setengah Penganggur

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah penganggur terdiri dari :



- Setengah penganggur terbuka adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- Setengah penganggur sukarela adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*)

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan

Jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal hal diluar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Luas Lantai

Luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari hari. Bagian bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, jemuran, dan warung (sebatas atap).

Dinding

Sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.

Atap

Penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami dibawahnya terlindung dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

Pengeluaran rata rata per kapita

Rata-rata biaya yang dikeluarkan rumahtangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumahtangga. Pengeluaran konsumsi rumahtangga dibedakan menjadi dua yaitu konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga





saja, tidak termasuk konsumsi pengeluaran untuk keperluan usaha rumahtangga atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, sedangkan pengeluaran untuk bukan makanan setahun yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata rata sebulan.

<https://bandungkota.bps.go.id>



<https://bandungkota.bps.go.id>





BAB II KEPENDUDUKAN

Salah satu agenda pembangunan yang disusun Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV Tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Selaras dengan hal tersebut, Kota Bandung menyusun strategi dan arah kebijakan sesuai dengan tujuan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, yaitu meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata; penyesuaian pembangunan berwawasan kesehatan; dan meningkatkan mutu layanan kesehatan demi tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah Kota Bandung yaitu membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya.

Dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan tersebut, diperlukan data kependudukan yang akurat dan terkini. Pembangunan tanpa didasari oleh data membutuhkan biaya yang lebih besar. Keberadaan data kependudukan sangat penting supaya arah pembangunan menjadi jelas dan terarah.

Kota Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat memiliki sumber daya manusia yang berlimpah. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas menjadi potensi sumber daya manusia yang handal dan modal dasar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penduduk yang berkualitas adalah penduduk yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, ditandai dengan kondisi ideal dimana jumlah penduduknya terkendali, terpenuhinya pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dengan layak, memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas.



Informasi kependudukan merupakan data strategis yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Pertumbuhan dan sebaran penduduk serta urbanisasi dan migrasi penduduk di Kota Bandung menjadi permasalahan utama. Dengan adanya informasi strategis ini, diharapkan Pemerintah dapat membuat kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Parameter kependudukan yang akan dibahas pada bab ini adalah jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, sex ratio, persebaran dan kepadatan penduduk, beban ketergantungan, rata-rata usia perkawinan pertama, dan penggunaan alat/cara KB.

2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

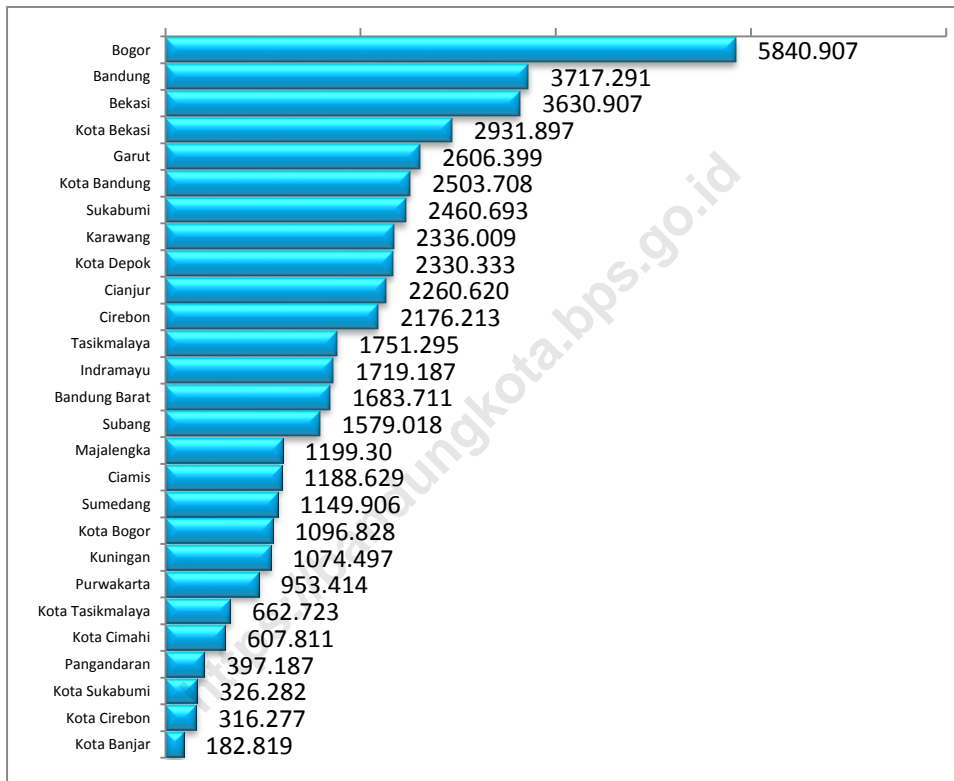
Sebagai ibukota provinsi, pertumbuhan penduduk Kota Bandung selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan proyeksi, penduduk jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2018 adalah sebesar 2.503.708 jiwa. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Kota Bandung berada di posisi keenam terbesar. Penduduk Kota Bandung mencakup 5,14 persen dari jumlah penduduk Jawa Barat. Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat, yaitu 5.840.907 jiwa, atau mencakup 12 persen dari total penduduk Jawa Barat.





Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2018 dapat dilihat pada Grafik 1 sebagai berikut.

Grafik 1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun 2018 (ribu jiwa)



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 2010-2020, BPS

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2017 yang sebesar 2,49 juta jiwa, terdapat peningkatan jumlah penduduk di tahun 2018 , yaitu sebesar 5,77 ribu jiwa. Bila dibandingkan dengan delapan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Bandung saat ini mengalami peningkatan sekitar 108,84 ribu jiwa dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yaitu sebesar 2,39 juta jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu delapan tahun terakhir jumlah penduduk Kota Bandung telah mengalami penambahan penduduk sebesar 4,54 persen.



Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Bandung menunjukkan tren yang terus menurun jika dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung sebesar 0,50 persen, turun menjadi sebesar 0,43 persen di tahun 2015. Tahun 2016 turun kembali dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37 persen, dan turun kembali tahun berikutnya menjadi 0,29 persen. Dan di tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung turun menjadi 0,23 persen. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk telah menunjukkan adanya keberhasilan.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung dari tahun 2014-2018 dapat di lihat dari Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Bandung, 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2014	2.470.802	0,50
2015	2.481.469	0,43
2016	2.490.622	0,37
2017	2.497.938	0,29
2018	2.503.708	0,23

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 2010-2020

2.2. Sebaran dan kepadatan penduduk

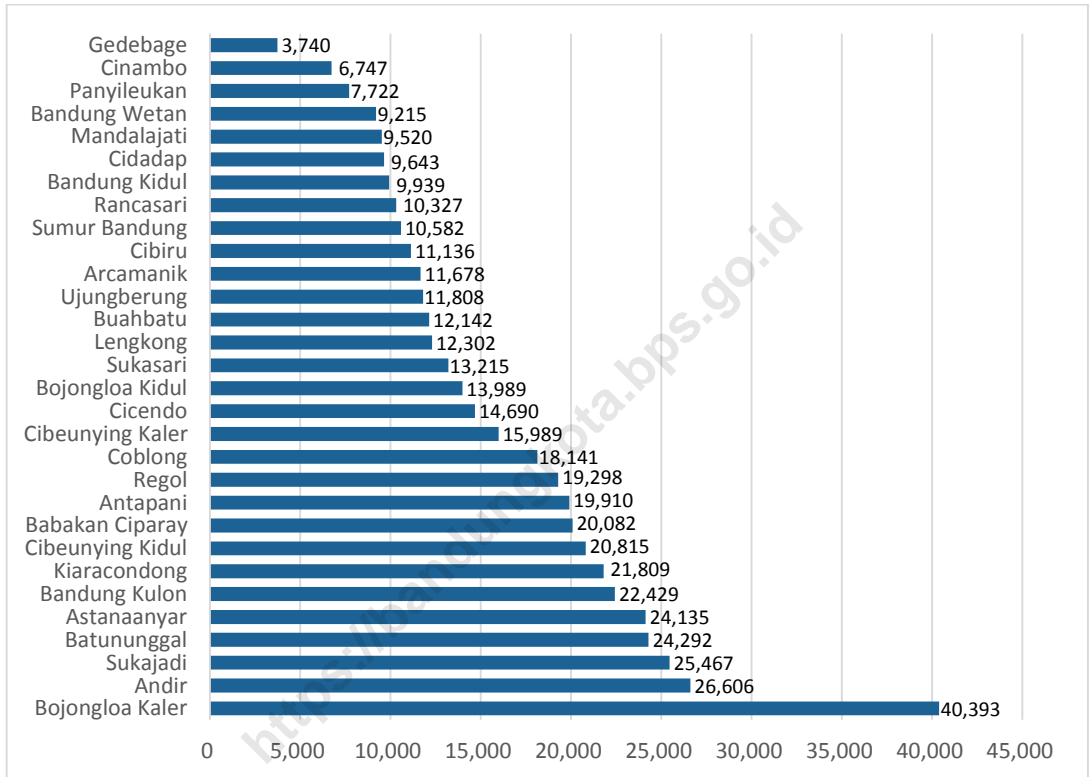
Salah satu masalah kependudukan yang dihadapi Kota Bandung adalah mengenai sebaran dan kepadatan penduduk. Tidak dapat dipungkiri Kota Bandung sebagai ibukota provinsi memiliki magnet dan daya tarik tersendiri untuk dijadikan tempat tinggal menetap.

Luas wilayah Kota Bandung hanya 0,47 persen dari luas Jawa Barat, sedangkan penduduknya pada tahun 2018 mencapai 5,14 persen dari total penduduk Jawa Barat.



Dilihat dari kepadatannya, tahun 2017 Kota Bandung mencapai 14.930 jiwa per Km² dan di tahun 2018 kepadatan tersebut bertambah menjadi 14.964 jiwa per Km².

Grafik 2 Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kota Bandung, 2018 (jiwa per km²)



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 2010-2020, BPS

Kecamatan terpadat di Kota Bandung adalah Kecamatan Bojongloa Kaler sebesar 40,39 ribu jiwa per Km², dengan luas lahan 3,03 Km² berpenduduk 122,39 ribu jiwa. Urutan kedua adalah Kecamatan Andir sebesar 26,61 ribu jiwa per Km², dimana jumlah penduduknya 98,71 ribu jiwa dengan luas lahan 3,71 Km². Kemudian Kecamatan Sukajadi dengan luas 4,3 Km² dan jumlah penduduk 109,51 ribu memiliki kepadatan penduduk sebesar 25,47 ribu jiwa per Km².

Penduduk Kota Bandung tersebar dominan di Kecamatan Babakan Ciparay sebesar 5,98 persen dari jumlah penduduk Kota Bandung. Selanjutnya Kecamatan Bandung Kulon



sebesar 5,79 persen, dan paling rendah sebaran penduduknya di Kecamatan Cinambo sebesar 0,99 persen dari jumlah penduduk Kota Bandung. Sebaran penduduk di Kota Bandung masih berpusat di kecamatan-kecamatan yang terletak di kawasan industri, pendidikan dan kawasan ekonomi. Sebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan seperti kemacetan, pengangguran, pemukiman kurang layak, dan lainnya.

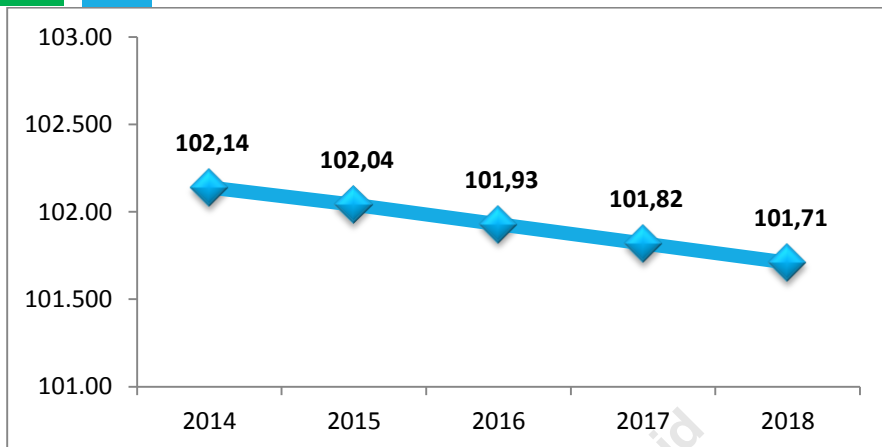
2.3. Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah. Pada tahun 2018, rasio jenis kelamin Kota Bandung adalah sebesar 101,71 dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1,26 juta dan perempuan sebanyak 1,24 juta jiwa. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Ratio jenis kelamin sebesar 101,71 menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan di Kota Bandung, maka terdapat sekitar 101 jiwa penduduk laki-laki. Angka tersebut terus menunjukkan penurunan selama lima tahun terakhir. Dari grafik 3 terlihat bahwa pada tahun 2014 rasio jenis kelamin Kota Bandung adalah 102,14 dan terus menurun hingga di tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan semakin seimbang dalam waktu lima tahun terakhir.

Grafik 3 Rasio Jenis Kelamin Kota Bandung, 2014-2018





Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 2014-2018, BPS

Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (65 tahun ke atas).

Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Angka Beban Ketergantungan Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.



Tabel 2 Angka Beban Ketergantungan di Kota Bandung, 2017-2018

Tahun	Angka Beban Ketergantungan
(1)	(2)
2016	39,37
2017	39,39
2018	38,32


Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Barat 2016-2018, BPS

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Penduduk Kota Bandung di tahun 2018 didominasi oleh penduduk usia produktif. Hal ini dapat dilihat dari angka beban ketergantungan Kota Bandung pada Tahun 2017 sebesar 39,39 dan turun pada tahun 2018 menjadi 38,32. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 38 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah.

Potensi penduduk usia produktif yang cukup besar dapat dioptimalkan agar dapat menjadi aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, tidak mungkin dapat menyebabkan timbulnya beragam permasalahan penduduk seperti tingginya pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan pemukiman kumuh. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih produktif, cerdas dan berkarakter sehat yang dapat menjadi





modal pembangunan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1, syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan untuk perempuan harus sudah berusia 16 tahun. Pasal 6 ayat 2 berbunyi, jika menikah di bawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali.

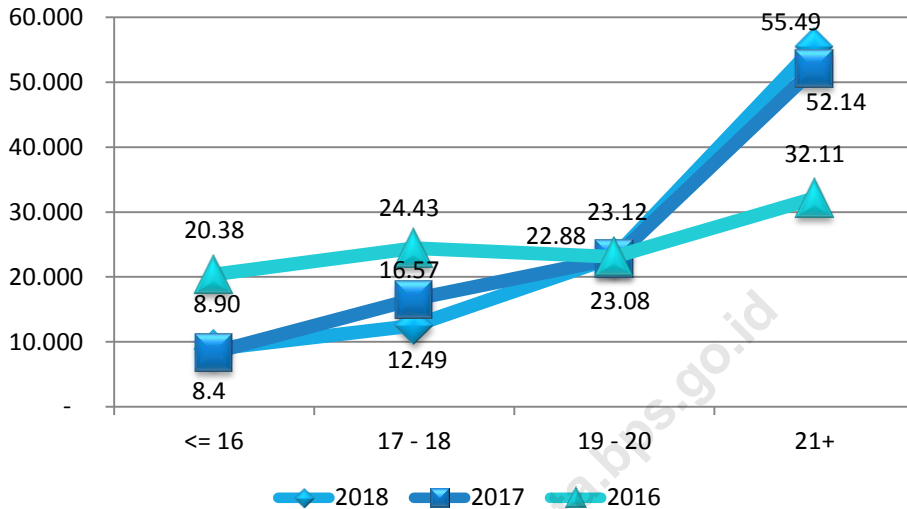
Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama idealnya adalah umur 21 hingga 25 tahun. Rekomendasi BKKBN sesuai dengan hak pendidikan 12 tahun, juga diharapkan ketika menikah sudah memiliki kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi serta kemampuan material dan mencegah meningkatnya pernikahan anak.

Banyak dampak buruk dari terjadinya pernikahan anak. Selain dampak psikologis dari seseorang yang belum dewasa dan siap untuk menikah, dapat menyebabkan tingginya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, angka kematian ibu dan anak dapat meningkat seiring terjadinya kehamilan di usia muda dan minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi.

Usia perkawinan pertama dapat menjadi salah satu pemicu pertambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya.



Grafik 4 Persentase Perempuan Pernah Kawin dan Umur Perkawinan Pertama, 2016-2018



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, 2016-2018

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, usia perkawinan pertama Kota Bandung yang perkawinannya di bawah umur 16 tahun ada sebesar 8,90 persen, antara umur 17-18 tahun sebesar 12,49 persen, rentang umur 19-20 tahun sebesar 23,12 persen, dan di atas 21 tahun sebesar 55,49 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap usia perkawinan pertama perempuan Kota Bandung, dimana perkawinan usia perkawinan di atas 21 tahun pada tahun 2016 sebesar 32,11 persen dan tahun 2017 meningkat pesat menjadi 52,14 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran dan kepedulian perempuan untuk menikah di usia ideal cenderung meningkat. Dengan semakin tingginya persentase perempuan yang menikah di usia ideal dapat menunjang keberhasilan peningkatan kesehatan ibu dan anak.





2.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Terdapat berbagai macam jenis alat/cara KB. Menurut masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu alat kontrasepsi hormonal dan permanen. Alat kontrasepsi hormonal umumnya mengandung kombinasi progesterin dan estrogen, atau progesteron saja. Alat kontrasepsi yang dapat digunakan dalam bentuk pil KB, suntik KB, implan, *Intra Uterine Device* (IUD), kondom dan lainnya. Biasanya digunakan untuk menunda dan mengatur jarak kehamilan yang memiliki masa kerja bersifat sementara baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan kontrasepsi permanen atau sterilisasi biasanya digunakan untuk perempuan yang tidak lagi menginginkan kehamilan karena faktor kesehatan, usia atau jumlah anak yang telah dilahirkan. Biasanya digunakan alat kontrasepsi seperti tubektomi/MOW, ligasi tuba, implan tuba, dan elektrokoagulasi tuba, sedangkan pada lelaki dapat dilakukan vasektomi/MOP.

Persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah, sedang atau tidak pernah menggunakan alat KB menurut kelompok pengeluaran dan pendidikan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.



Tabel 3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2018

Karakteristik	Status Penggunaan Alat/Cara KB			Jumlah
	Pernah Menggunakan	Sedang Menggunakan	Tidak Pernah Menggunakan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelompok Pengeluaran				
40 Persen Terbawah	9,34	59,91	30,75	100,00
40 Persen Tengah	9,23	55,75	35,02	100,00
20 Persen Teratas	6,90*	41,78	51,32	100,00
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	14,85	48,72	36,43	100,00
SMP ke atas	7,21	57,14	35,66	100,00
Kota Bandung	8,90	55,27	35,83	100,00

Keterangan : * RSE 37,27 persen

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2018

Berdasarkan Susenas 2018 dapat diketahui bahwa 8,90 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun pernah menggunakan alat KB, 55,27 persen sedang menggunakan, dan sisanya 35,83 persen tidak menggunakan alat KB.

Sedangkan menurut kelompok pengeluarannya, 69,25 persen dari perempuan dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah pernah dan sedang menggunakan alat KB, 64,98 persen berada di kelompok 40 persen tengah, dan 48,68 persen berada di kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Jika dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi, persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah dan sedang menggunakan KB dan berpendidikan SD ke bawah adalah 63,57 persen. Sedangkan yang berpendidikan SMP ke atas adalah sebesar 64,35 persen.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dicermati masih besar peluang untuk meningkatkan persentase peserta KB aktif, sehingga visi nawacita yang merupakan program prioritas pemerintah yaitu pembangunan manusia yang berkualitas dapat terwujud.



BAB III KESEHATAN

Agenda pembangunan nasional nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia seiring dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menunjukkan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia yang direalisasikan dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023.

Salah satu sasaran pokok RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tujuan membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya.

Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain: (1) Penyelarasan pembangunan berwawasan kesehatan; (2) Meningkatkan mutu layanan kesehatan; (3) Meningkatkan kualitas lingkungan sehat; (4) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan; (5) Meningkatkan penanggulangan gawat darurat terpadu; dan (6) Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan (*Pemkot Bandung, 2018*)

Menurut Winslow (1920) kesehatan masyarakat atau *public health* adalah ilmu untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosa dini dan pengobatan, dan pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup layak dalam memelihara kesehatannya.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat diantaranya melalui program-program kesehatan gratis, meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkualitas, merata dan terjangkau.



Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

3.1. Derajat dan Status Kesehatan

Menurut Hendrik L. Blum (1974), terdapat empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Lingkungan memberi pengaruh paling besar dalam determinasi derajat kesehatan masyarakat yaitu sebesar 45 persen. Selanjutnya perilaku kesehatan memiliki pengaruh sebesar 30 persen, pelayanan kesehatan sebesar 20 persen, dan faktor keturunan memiliki pengaruh sebesar 5 persen.

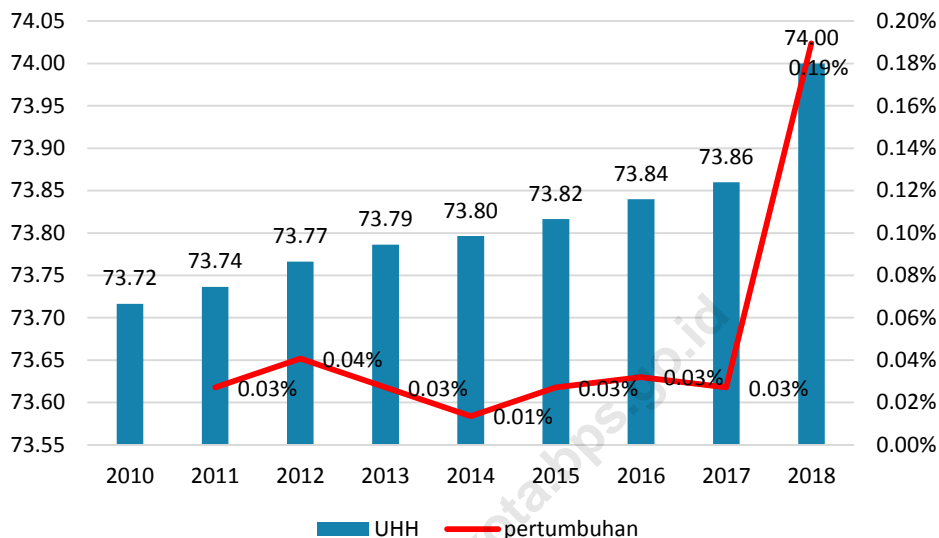
Tingkat kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya umur harapan hidup penduduknya. Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi UHH berarti semakin rendah angka kematian.

UHH digunakan sebagai indikator derajat kesehatan penduduk dan kemampuan pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan, terpenuhinya kecukupan gizi dan kalori penduduk, dan kesehatan lingkungan yang baik.

UHH Kota Bandung bergerak naik setiap tahunnya, mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2018, Kota Bandung mampu meningkatkan UHH sebesar 0,28 tahun. Kurun waktu tersebut, rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,05 persen per tahun. Pada tahun 2010, UHH Kota Bandung sebesar 73,72 tahun, dan tahun 2018 mencapai 74 tahun.



Grafik 5 Tren Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun) dan Pertumbuhannya (%) di Kota Bandung, 2010 – 2018



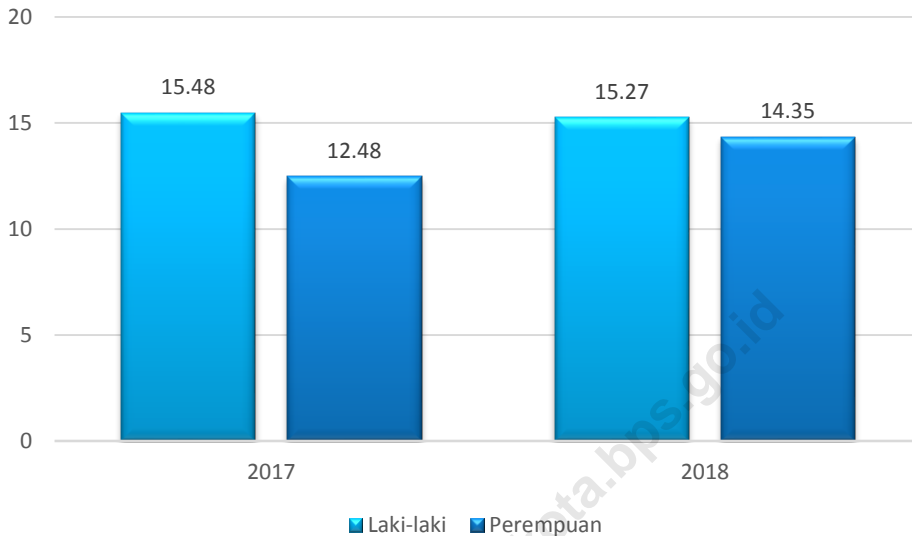
Sumber: ipm.bps.go.id

Peningkatan angka usia harapan hidup sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Tingkat Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).



Grafik 6 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Sebulan yang Lalu menurut Jenis Kelamin, 2018



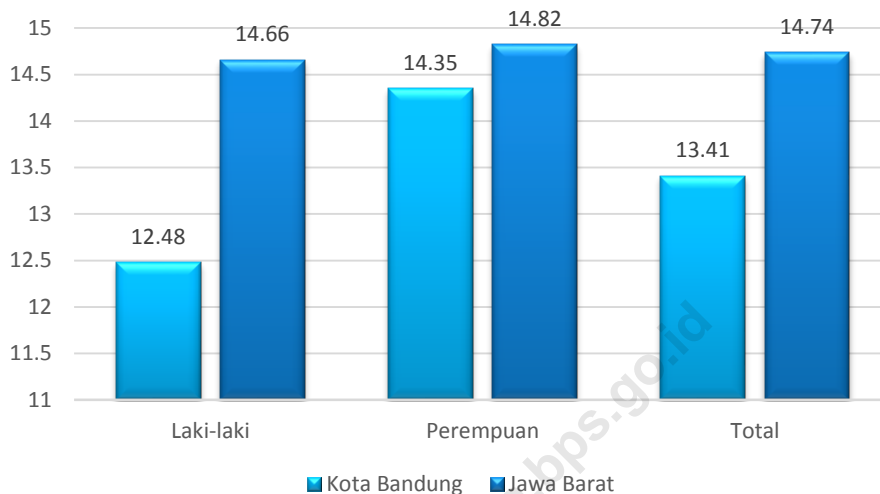
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2018, diolah

Berdasarkan hasil Susenas 2018, angka kesakitan penduduk Kota Bandung sebesar 13,41 persen. Angka kesakitan penduduk Kota Bandung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 6 bahwa angka kesakitan penduduk laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada tahun 2017, angka kesakitan penduduk laki-laki sebesar 15,48 persen sedangkan penduduk perempuan 12,48 persen. Pada tahun 2018 tercatat angka kesakitan penduduk laki-laki turun menjadi 15,27 persen, dan angka kesakitan penduduk perempuan naik menjadi 14,35 persen.

Jika dibandingkan dengan angka kesakitan penduduk Jawa Barat dapat dilihat bahwa angka kesakitan penduduk Kota Bandung lebih rendah dibandingkan penduduk Jawa Barat. Seperti dilihat pada Grafik 7, angka kesakitan Jawa Barat sebesar 14,74 persen dimana angka kesakitan penduduk laki-laki sebesar 14,66 persen dan angka kesakitan penduduk perempuan sebesar 14,82 persen.



Grafik 7 Persentase Angka Kesakitan Penduduk Kota Bandung dan Jawa Barat menurut Jenis Kelamin, 2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2016 - 2018

3.2. Pemanfaatan Tenaga Kesehatan

Target pembangunan kesehatan Indonesia seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya indikator-indikator status kesehatan dan gizi masyarakat. Tahun 2019, Pemerintah menargetkan Angka Kematian Ibu (AKI) 306 orang per 100 ribu kelahiran hidup, berkurang dari status sebelumnya sebanyak 346 ibu per 100 ribu kelahiran hidup. Namun demikian, penurunan kematian ibu melahirkan tersebut masih jauh dari target MDGs tahun 2015 yang harus dicapai yaitu sebesar 102 ibu per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup (*Profil Kesehatan Indonesia 2018*)



Beberapa keadaan yang menyebabkan tingginya Angka Kematian Ibu antara lain adalah kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat, dan faktor lainnya. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan kondisi ibu hamil yang tidak sehat adalah penanganan komplikasi, anemia, ibu hamil yang menderita diabetes, hipertensi, malaria, dan empat terlalu (terlalu muda < 20 tahun, terlalu tua > 35 tahun, terlalu dekat jaraknya kurang dari 2 tahun, dan terlalu banyak anak) (*Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019*).

Upaya untuk menurunkan AKI dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas dan pemahaman mengenai kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis yang memiliki kualifikasi dan terampil dalam membantu proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase tenaga penolong dan fasilitas tempat persalinan yang digunakan. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan mampu memperluas akses, meningkatkan sarana prasarana pelayanan, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pelayanan kesehatan.

Data Susenas menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan sepenuhnya dibantu oleh tenaga kesehatan dalam proses melahirkannya.



Tabel 4 Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Proses Kelahiran Terakhir, 2016-2018

Penolong Persalinan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Kesehatan			
Dokter Kandungan	45,68	42,37	45,21
Dokter Umum	1,80	0,00	1,22
Bidan	51,28	54,79	52,56
Perawat	0,00	1,16	1,02
Tenaga Paramedis Lainnya	0,00	1,68	0,00
Bukan Tenaga Kesehatan			
Dukun Bersalin	1,25	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2016 - 2018

Dari Tabel 4 diketahui bahwa 45,21 persen penolong persalinan dilakukan oleh dokter kandungan, dokter umum sebesar 1,22 persen, dibantu bidan 52,56 persen, dan penolong persalinan dengan dibantu perawat sebesar 1,02 persen. Karakteristik masyarakat dengan tingkat pendidikan, pendapatan dan pengetahuan mempengaruhi pilihan tempat melahirkan.

Sedangkan jika dilihat dari tempat melahirkannya, persentase perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.



Tabel 5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup yang Terakhir, 2016-2018

Tempat Melahirkan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin	42,57	41,03	42,19
Praktek Dokter/Bidan/Poliklinik	51,82	34,48	30,74
Puskesmas/Pustu	2,55	22,38	22,60
Rumah	3,06	2,11	2,74
Lainnya	0	0	1,73
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2016 - 2018

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa 42,19 persen masyarakat memilih melahirkan di rumah sakit atau rumah sakit bersalin, 30,74 persen melahirkan di praktek dokter atau bidan atau poliklinik, 22,60 persen melahirkan di puskesmas atau pustu, 2,74 persen melahirkan di rumah, dan sisanya 1,73 persen lainnya.

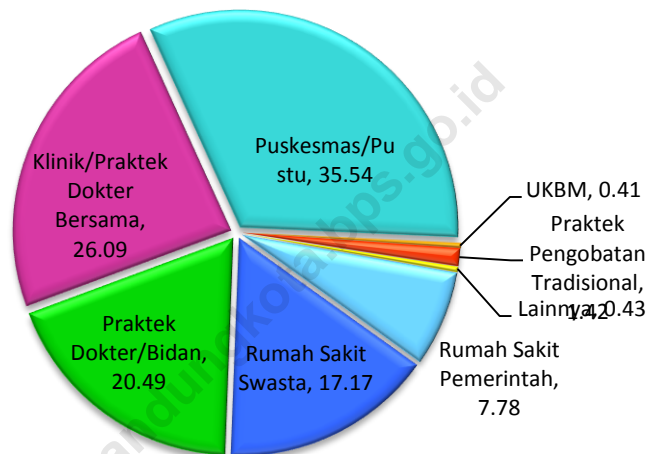
Peningkatan penduduk yang melakukan persalinan di rumah sakit atau rumah sakit bersalin semakin meningkat seiring semakin baiknya ketersediaan tempat pelayanan kesehatan untuk melahirkan. Akses penduduk dalam memanfaatkan tempat melahirkan tidak hanya dilihat dari indikator penolong kesehatan saja, tetapi dapat dilihat juga dari ketersediaan atau kemudahan akses tempat melahirkannya, kualitas tenaga kesehatan terlatih yang dimiliki, dan kemampuan masyarakat untuk membiayai persalinannya. Diharapkan pemanfaatan BPJS dan pembiayaan kesehatan lainnya dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pelayanan fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Pada umumnya masyarakat memilih fasilitas kesehatan terkait erat dengan akses tempat pelayanan dan kondisi sosial ekonominya. Masyarakat cenderung memilih tempat fasilitas kesehatan yang dekat dengan tempat tinggalnya dan terjangkau dari segi biaya.



Perubahan sikap masyarakat dalam memilih tempat fasilitas kesehatan yang dilakukan dapat dilihat melalui Grafik 8 sebagai berikut.

Grafik 8 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir berdasarkan Tempat Berobat Jalan, 2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2018

Dari Grafik 8 diketahui bahwa 35,54 persen penduduk memilih berobat ke Puskesmas/Pustu, 26,09 persen melakukan pengobatan rawat jalan ke klinik/praktek dokter bersama, 20,49 persen memilih berobat ke praktek dokter/bidan, 17,78 persen berobat ke rumah sakit swasta, 7,78 persen berobat ke rumah sakit pemerintah, 1,42 persen memilih berobat ke praktek pengobatan tradisional, 0,41 persen berobat ke posyandu/balai pengobatan, dan sisanya 0,43 persen lainnya.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang terampil dan terakreditasi serta fasilitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga upaya penguatan kesehatan dasar yang berkualitas melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dapat terwujud.



<https://bandungkota.bps.go.id>

BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pendidikan merupakan hak dasar warga negara Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Di pasal lain, yaitu pasal 28C, ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya dalam pasal 31 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang



dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

4.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Sektor pendidikan sendiri menurut data IPM Indonesia yang dirilis oleh United Nation Development Program (UNDP) pada 2 November 2011 memberikan kontribusi sebanyak 0,58. Oleh karena itu sektor pendidikan memegang peranan penting dalam penghitungan IPM (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/164932>).

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, pemerintah menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka



putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah.

Pemerintah telah menggulirkan beberapa program yang berkaitan dengan pendidikan. Program Bantuan Operasioanal Sekolah adalah salah satu program bantuan dari pemerintah kepada seluruh sekolah yang terdaftar resmi berupa bantuan biaya operasional sekolah. Program lainnya adalah Program Indoneisa Pintar, yaitu program pemberian bantuan tunai pendikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin. Dengan adanya program tersebut, diharapkan seluruh anak Indonesia dapat bersekolah.

Kota Bandung adalah Kota dengan IPM yang tinggi, yaitu mencapai 81,06 di tahun 2018. Rata-rata lama Sekolah penduduk di Kota Bandung pada tahun 2018 adalah 10,63 tahun. Ini berarti rata-rata penduduk Kota Bandung baru mampu menempuh pendidikan adalah selama 10,63 tahun, yaitu setara dengan kelas 1 SMA atau putus sekolah dikelas 2 SMA. Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bandung mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 10,59 tahun di tahun 2017 dan 10,59 tahun di tahun 2016.

Tabel 6 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) (tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) (tahun) di Kota Bandung, 2016 – 2018

Indikator Pendidikan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	13,89	13,90	14,18
Rata-rata lama sekolah (MYS)	10,58	10,59	10,63

Sumber: *ipm.bps.go.id*



Demikian pula dengan Angka Harapan Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Bandung mencapai 14,18 tahun. Ini berarti pada tahun 2018, penduduk usia 7 tahun di Kota Bandung memiliki harapan dapat bersekolah selama 14,18 tahun. Angka ini mengalami kenaikan cukup besar, yaitu 0,28 tahun dibandingkan dengan tahun yaitu 13,90 tahun di 2017.

Tabel 7 Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) (tahun) dan Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) (tahun) di Kota Bandung dan Jawa Barat, 2016 – 2018

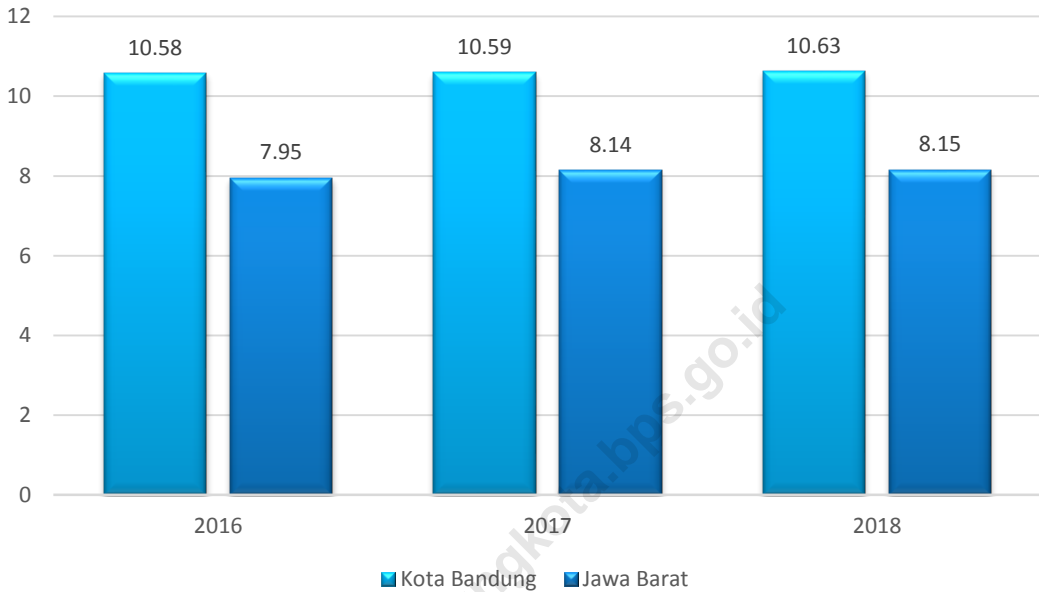
Indikator Pendidikan	Kota Bandung			Jawa Barat		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Harapan Lama Sekolah	13,89	13,90	14,18	12,30	12,42	12,45
Rata-rata lama sekolah	10,58	10,59	10,63	7,95	8,14	8,15

Sumber: *ipm.bps.go.id*

Jika dibandingkan dengan Jawa Barat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Kota Bandung berada jauh di atas rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk Jawa Barat. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah Jawa Barat adalah sebesar 8,15 tahun. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah Jawa Barat yang adalah sebesar 12,45 tahun.



Grafik 9 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bandung, Tahun 2016-2018 (tahun)

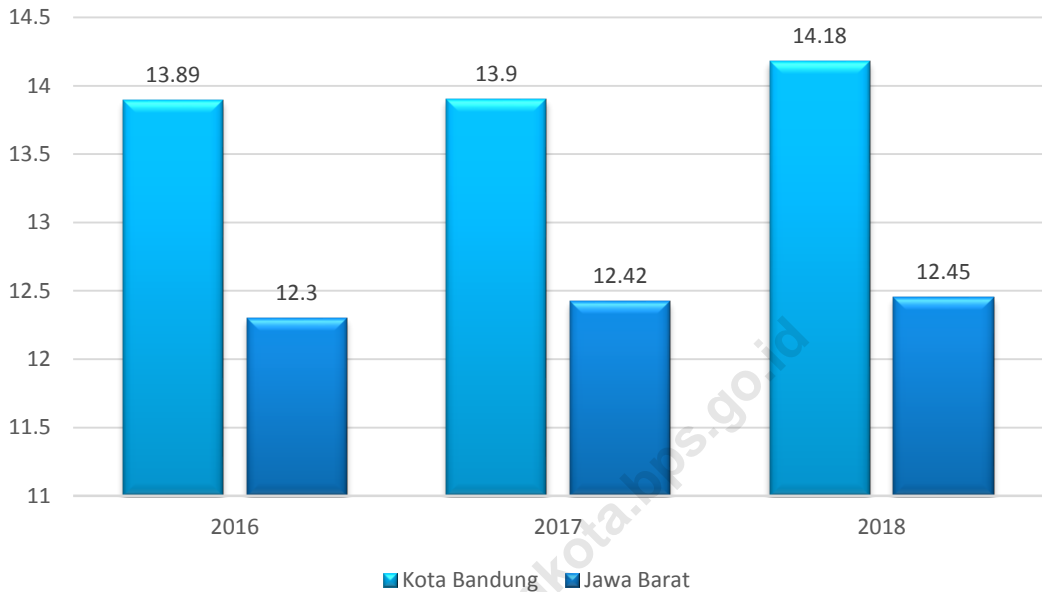


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2016-2018

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, rata-rata lama sekolah Kota Bandung merupakan rata-rata lama sekolah tertinggi keempat setelah Kota Bekasi (11,09 tahun), Kota Cimahi (10,94 tahun), dan Kota Depok (10,85 tahun). Sedangkan harapan lama sekolah Kota Bandung merupakan angka harapan lama sekolah tertinggi di Jawa Barat.



Grafik 10. Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Bandung dan Jawa Barat, Tahun 2016-2018 (Tahun)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2016-2018

4.2. Status Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.



Tabel 8. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Kota Bandung, 2017 dan 2018

Partisipasi Sekolah	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tdk /belum pernah bersekolah	0,11	0,26	0,13	0	0,12	0,13
Masih Bersekolah	69,79	71,50	70,53	71,77	70,16	71,62
SD sederajat	27,60	30,87	28,43	27,17	28,01	29,07
SMP sederajat	11,47	10,38	11,52	15,04	11,50	12,64
SMA sederajat ke atas	30,72	30,25	30,58	29,56	30,65	29,91
Tidak bersekolah lagi	30,09	28,24	29,34	28,23	29,72	28,24

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2017-2018

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 komposisi partisipasi sekolah penduduk Kota Bandung usia 7-24 tahun adalah 0,13 tahun tidak/belum pernah bersekolah, 71,62 persen masih bersekolah dan 28,24 persen tidak bersekolah lagi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan status masih bersekolah pada penduduk usia 7-24 tahun yang sebesar 70,16 persen di tahun 2017.

Penduduk Kota Bandung usia 7-24 tahun dengan status masih bersekolah terdiri dari 29,07 persen bersekolah di jenjang SD; 12,64 persen di jenjang SMP sederajat dan 29,91 persen di jenjang SMA sederajat ke atas. Partisipasi sekolah di jenjang SD sederajat mengalami peningkatan di tahun 2018 yaitu sebesar 29,07 persen dari 28,01 persen di tahun 2017. Kondisi yang sama juga terjadi di jenjang SMP sederajat yaitu 12,64 persen di tahun 2018 dari 11,50 di tahun 2017. Sedangkan untuk jenjang SMA sederajat ke atas mengalami penurunan yaitu 29,91 persen di tahun 2018 dari 30,65 persen di tahun 2017.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki dan perempuan usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah relatif sama, yaitu 71,50 untuk



penduduk laki-laki dan 71,77 untuk penduduk perempuan. Persentase ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kondisi 2017, yaitu 69,79 untuk penduduk laki-laki dan 70,53 untuk penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa baik penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Bandung berpartisipasi sama dalam menikmati pendidikan.

Bila dilihat dari jenjang sekolah, partisipasi sekolah penduduk laki-laki usia 7-24 di Kota Bandung, pada jenjang SMA sederajat ke atas sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 30,25 persen untuk penduduk laki-laki dan 29,56 untuk penduduk perempuan di tahun 2018. Demikian pula di tahun 2017, di mana partisipasi sekolah di jenjang SMA sederajat ke atas untuk penduduk laki-laki sebesar 30,72 dan 30,58 persen untuk penduduk perempuan.

Untuk jenjang SMP sederajat terdapat kondisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jika dibandingkan keadaan pada tahun 2017 dan 2018, partisipasi sekolah penduduk laki-laki usia 7-24 tahun mengalami sedikit penurunan di jenjang SMP sederajat yaitu 11,47 persen di tahun 2017 menjadi 10,38 persen di tahun 2018. Hal ini berbeda di penduduk perempuan di mana persentase sedang bersekolah di jenjang SMP sederajat mengalami sedikit peningkatan, yaitu 11,52 persen di tahun 2017 menjadi 15,04 persen di tahun 2018.

Untuk jenjang SD, partisipasi sekolah penduduk laki-laki memperlihatkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 27,60 persen di tahun 2017 menjadi 30,87 persen di tahun 2018. Sedangkan untuk penduduk perempuan menunjukkan ada penurunan yaitu 28,43 persen di tahun 2017 menjadi 27,17 persen di tahun 2018. Baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan hal ini memperlihatkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat untuk bersekolah dasar. Untuk itu perlu diperhatikan akses untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya agar program wajib belajar 9 tahun dapat terpenuhi.

Dari seluruh penduduk Kota Bandung usia 7-24 tahun terdapat 28,24 persen penduduk yang berstatus tidak bersekolah lagi. Kondisi ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 yang sebesar 29,72 persen. Baik penduduk laki-laki ataupun perempuan mengalami penurunan persentase status tidak bersekolah lagi.



4.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap khususnya indikator APS dan APK selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Berdasarkan Susenas tahun 2018, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di seluruh kelompok umur di daerah Kota Bandung bila dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel 9. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah di Kota Bandung dan Jawa Barat, 2017 dan 2018 (persen)

Kelompok Umur	Kota Bandung		Jawa Barat	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12	99,82	99,89	99,08	99,52
13-15	95,55	96,81	94,98	94,15
16-18	75,42	78,04	71,20	67,17

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2017-2018

APS penduduk berumur 7-12 tahun pada tahun 2018 sebesar 99,89 persen atau mengalami peningkatan 0,07 point dari tahun sebelumnya yang sebesar 99,82 persen. APS penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 96,81 persen atau mengalami peningkatan 1,26 point dari tahun sebelumnya (tahun 2016) yang sebesar 95,55 persen. Sementara itu, APS penduduk berumur 16-18 tahun juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,62 point dari 75,42 persen di tahun 2017 menjadi 78,04 persen di tahun 2018. Peningkatan APS pada



kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Jika dilihat perbandingan antara Kota Bandung dan Jawa Barat, pada tahun 2018 APS penduduk di Kota Bandung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai capaian Jawa Barat pada semua kelompok umur. Di Kota Bandung, APS kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,89 persen sedangkan nilai capaian Jawa Barat sebesar 99,52 persen. Sementara itu, pada APS kelompok umur 13-15 tahun dimana Kota Bandung sebesar 96,51 persen sedangkan nilai capaian Jawa Barat sebesar 94,15 persen. Sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun, APS di Kota Bandung sebesar 78,04 persen, sedangkan nilai capaian Jawa Barat sebesar 67,17 persen. Pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah agar lebih merata dan dapat dijangkau bagi masyarakat Kota Bandung baik yang tinggal di pusat kota maupun di daerah pinggiran/perbatasan Kota Bandung dengan Kabupaten sekitarnya.

Tabel 10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Pengeluaran dan Kelompok Umur di Kota Bandung dan Jawa Barat, 2018 (persen)

Kelompok Pengeluaran	Usia		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	
40 persen terbawah	99,79	94,59	68,83
40 persen tengah	100	98,86	76,61
20 persen teratas	100	100	97,33

Sumber: Statistik Kesejahteraan Jawa Barat, 2018

Jika dihubungkan dengan pengeluaran masyarakat terdapat perbedaan partisipasi sekolah di setiap kelompok umurnya. Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa hampir seluruh masyarakat di Kota Bandung dapat berpartisipasi dalam pendidikan untuk usia 7-12 tahun. Persentase tersebut mulai mengecil di kelompok umur 13-15. Dari tabel di atas dapat dilihat



bahwa partisipasi sekolah pada masyarakat dengan 40 persen pengeluaran terbawah menurun mulai usia 13-15 tahun dan lebih menurun lagi di kelompok umur 16-18. Angka Partisipasi Sekolah penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah di Kota Bandung untuk kelompok umur 68,83 persen. Ini berarti pada tahun 2018, tidak sampai 70 persen penduduk usia 16-18 tahun yang berasal dari rumah tangga dengan pengeluaran 40 persen terendah di Kota Bandung yang masih bersekolah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena sejak tahun 2015 pemerintah telah mencanangkan wajib belajar hingga 12 tahun. Hal ini tentu berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan diharapkan penduduk Indonesia mampu untuk bersaing di dunia kerja dan dapat hidup dengan kualitas yang lebih baik.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Bandung juga mengalami perubahan pada tahun 2018. Angka Partisipasi Murni adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Tabel 11. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bandung dan Jawa Barat, 2017 – 2018 (persen)

Jenjang Pendidikan (1)	Kota Bandung		Jawa Barat	
	2017 (2)	2018 (3)	2017 (4)	2018 (5)
SD sederajat	97,22	98,88	97,99	98,25
SMP sederajat	83,53	79,58	80,24	81,01
SMA sederajat	65,78	67,34	57,04	57,33

Sumber: Statistik Kesejahteraan Jawa Barat, 2017-2018

APM pada jenjang pendidikan SD/sederajat di Kota Bandung pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017. Pada tahun 2017 APM pada jenjang pendidikan



SD/ sederajat di Kota Bandung sebesar 97,22 persen dan mengalami peningkatan sebesar 1,66 persen menjadi sebesar 98,88 persen pada tahun 2018. APM di Kota Bandung pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Pada tahun 2018 APM di Kota Bandung pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat sebesar 79,58 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 3,95 persen dibanding tahun 2017 yang sebesar 83,53 persen. Sedangkan APM pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017 APM di Kota Bandung pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat sebesar 65,78 persen. Sedangkan di tahun 2018 APM jenjang pendidikan SMA/ sederajat meningkat 1,56 point menjadi 67,34 persen.

Pada tahun 2018 APM Kota Bandung pada jenjang pendidikan SD/ sederajat memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan capaian Jawa Barat, yaitu sebesar 98,88 persen untuk Kota Bandung dan 98,25 persen untuk Jawa Barat. Sedangkan APM Kota Bandung untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat persentasenya lebih rendah dibanding capaian Jawa Barat, yaitu 79,58 persen untuk Kota Bandung dan 81,01 persen untuk Jawa Barat. Untuk APM SMA/ sederajat Kota Bandung lebih tinggi dibanding APM Jawa Barat, yaitu sebesar 67,34 persen untuk Kota Bandung sedangkan APM SMA/ sederajat Jawa Barat hanya sebesar 57,33 persen.

Dari gambaran pembahasan APS, APM dan APK di atas masih menunjukkan adanya kesenjangan. Kesenjangan ini diakibatkan oleh layanan pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perbatasan yang secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut juga diduga karena masalah ekonomi (kemiskinan). Selain itu, di samping faktor ekonomi fasilitas layanan pendidikan yang masih belum merata dan sangat terbatas turut menghambat partisipasi pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang merata dan mudah dijangkau masyarakat serta memberikan penyelenggaraan pendidikan yang layak dari segala sisi di seluruh wilayah Kota Bandung mulai dari pusat Kota Bandung sampai wilayah pelosok Kota Bandung.





BAB V KETENAGAKERJAAN

Salah satu visi dan misi Pemerintah Kota Bandung seperti yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 adalah membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Kota Bandung sebagai kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung adalah masalah ketenagakerjaan. Tingginya angka pengangguran, masih rendahnya kompetensi dan keahlian yang dimiliki pencari kerja sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah maupun luar negeri. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) bulan Agustus 2018. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.



5.1. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Indikator ini diartikan semakin tinggi jumlah angkatan kerja, berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja. Indikator ini merupakan salah satu yang digunakan untuk menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, atau mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha atau mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. Indikator untuk mengukur pengangguran biasanya disebut sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Bandung pada bulan Agustus 2018 sebanyak 1.943.396 orang, bertambah 87.922 orang dibanding Agustus 2017. Sedangkan penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran pada bulan Agustus 2018 adalah sebanyak 1.204.451 orang.

91,99 persen angkatan kerja di Kota Bandung melakukan aktivitas bekerja. Bekerja di sini berarti melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam tidak terputus seminggu yang lalu, juga termasuk kegiatan pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga yang membantu suatu kegiatan atau usaha ekonomi.



Tabel 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung menurut Jenis Kelamin (persen), 2015-2018

Indikator	TPAK		TPT	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	78,11	46,73	8,49	9,91
2017	80,52	45,51	7,88	9,43
2018	78,23	45,57	7,16	9,49

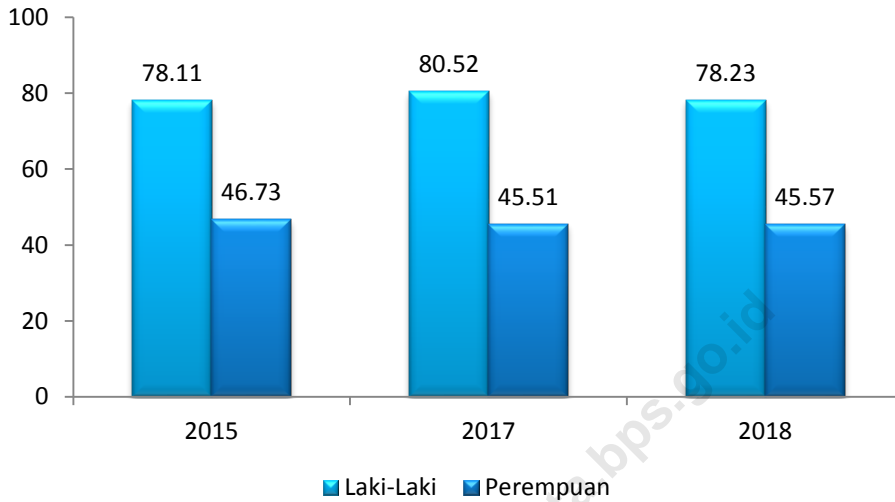
Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2018

TPAK Agustus 2018 Kota Bandung sebesar 61,98 persen. Artinya sebesar 61,98 persen penduduk Kota Bandung merupakan angkatan kerja dibandingkan jumlah keseluruhan penduduk usia kerja. Sedangkan TPT Agustus 2018 Kota Bandung sebesar 8,01 persen. Ini berarti 8,01 persen angkatan kerja Kota Bandung dalam keadaan tidak bekerja atau pengangguran.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa TPAK laki-laki pada bulan Agustus 2018 lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2017, TPAK laki-laki sebesar 80,52 persen menurun 2,29 poin di tahun 2018 menjadi 78,23 persen. Sedangkan TPAK perempuan tahun 2017 sebesar 45,51 persen, naik 0,06 poin menjadi 45,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi dalam aktivitas bekerja atau usaha ekonomi, sedangkan partisipasi perempuan masih sangat rendah dalam kegiatan ekonomi.



Grafik 11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Bandung menurut Jenis Kelamin, 2015-2018 (persen)

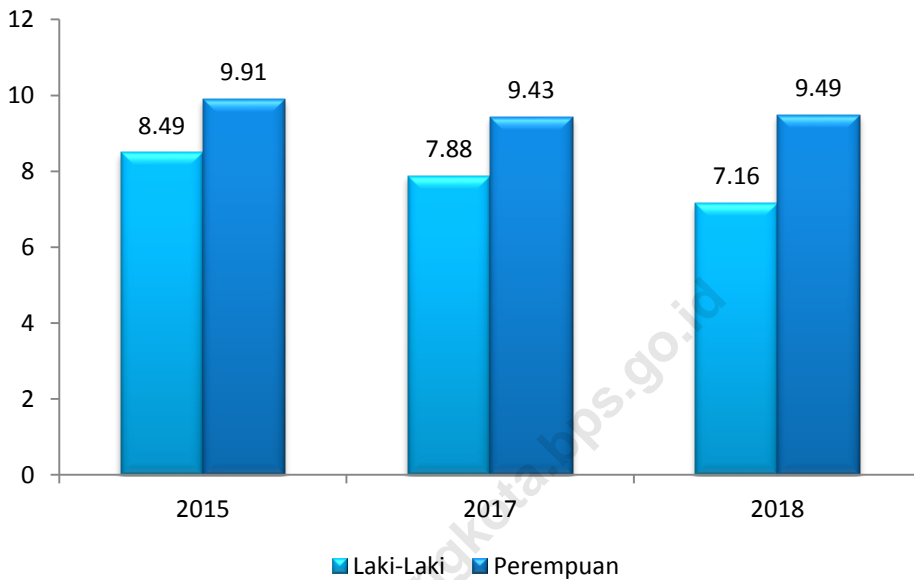


Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2018

Seperti halnya TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung pada bulan Agustus 2018 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2017. TPT Kota Bandung pada tahun 2018 sebesar 8,01 persen, menurun 0,47 poin dibandingkan tahun 2017. Jumlah pengangguran Kota Bandung di bulan Agustus 2018 sebanyak 96 ribu orang. Masih tingginya tingkat pengangguran di Kota Bandung menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di Kota Bandung tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar.



Grafik 112 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung menurut Jenis Kelamin, 2015-2018 (persen)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2018

Sedangkan menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. TPT laki-laki Kota Bandung tahun 2018 sebesar 7,16 persen, turun 0,72 poin dari 7,88 persen di tahun 2017. Selain itu, TPT perempuan 2017 sebesar 9,43 persen naik 0,06 poin menjadi 9,49 persen di tahun 2018.

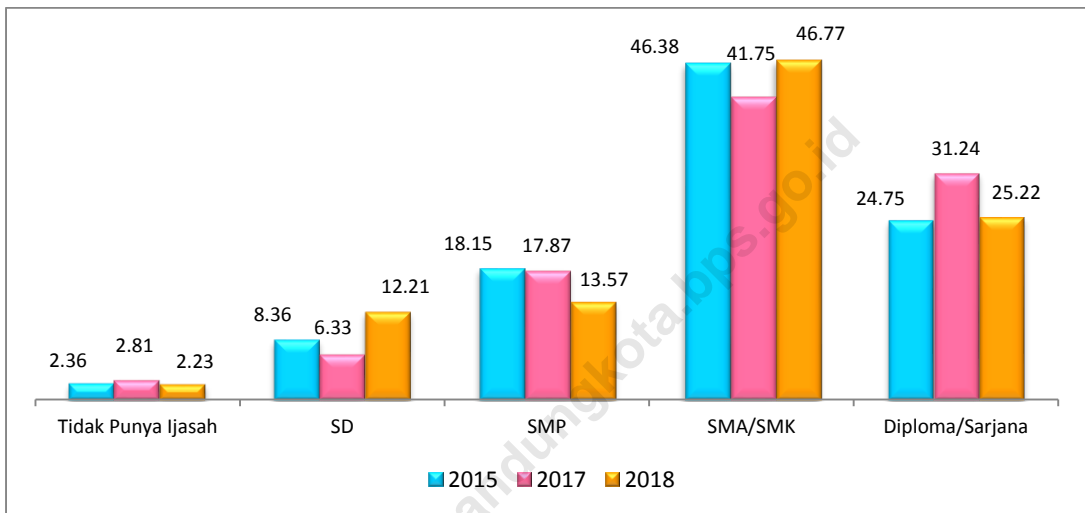
5.2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

Kota Bandung sebagai kota pendidikan dimana banyak terdapat sekolah mulai dari tingkat dasar hingga jenjang perguruan tinggi tidak memungkinkan masih banyaknya pengangguran di Jawa Barat. Sudah sewajarnya seseorang berharap mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikannya. Tetapi di tengah persaingan kerja yang semakin tinggi dan



peluang dan keterbatasan lapangan kerja yang semakin sempit, tidak dapat dipungkiri masih banyak pengangguran yang memiliki ijazah cukup tinggi.

Grafik 13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Bandung, 2015 – 2018 (persen)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2018

Dari Grafik 13 menggambarkan bahwa penyumbang terbanyak pengangguran di Kota Bandung adalah penduduk usia 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi SMA/SMK sederajat. Pengangguran terbuka dari angkatan kerja yang tidak berijazah, SMP sederajat, dan Diploma/Sarjana cenderung menurun. Sedangkan penduduk usia 15 tahun ke atas dengan pendidikan tertinggi SD sederajat dan SMA/SMK sederajat meningkat. Secara umum, Persentase pengangguran terbuka pada penduduk dengan pendidikan SMA/SMK sederajat dan Diploma/Sarjana menjadi kelompok penganggur terbanyak.

Pada Tahun 2015 persentase pengangguran terbuka penduduk berpendidikan SMA/SMK sederajat sebesar 46,38 persen, tahun 2017 turun menjadi 41,75 persen, dan di tahun 2018 naik menjadi 46,77 persen. Persentase pengangguran terbuka yang berpendidikan terakhir Diploma/Sarjana tahun 2015 sebesar 24,75 persen naik menjadi 31,24 persen di tahun 2017 dan turun kembali menjadi 25,22 persen di tahun 2018.





Sedangkan pada tingkat penduduk usia 15 tahun ke atas yang berijazah tertinggi SMP sederajat cenderung menurun. Tahun 2015 persentase pengangguran terbuka sebesar 18,15 persen, turun di tahun 2017 menjadi 17,87 persen, dan turun cukup tinggi di tahun 2018 menjadi 13,57 persen.

Pada tahun 2015, persentase pengangguran terbuka pada penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan terakhir SD sebesar 8,36 persen, turun di tahun 2017 menjadi 6,33 persen dan naik menjadi 12,21 persen di tahun 2018.

Persentase pengangguran terbuka pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah sebesar 2,36 persen di tahun 2015, dan naik menjadi 2,81 persen di tahun 2017, cenderung menurun kembali di tahun 2018 menjadi 2,23 persen.

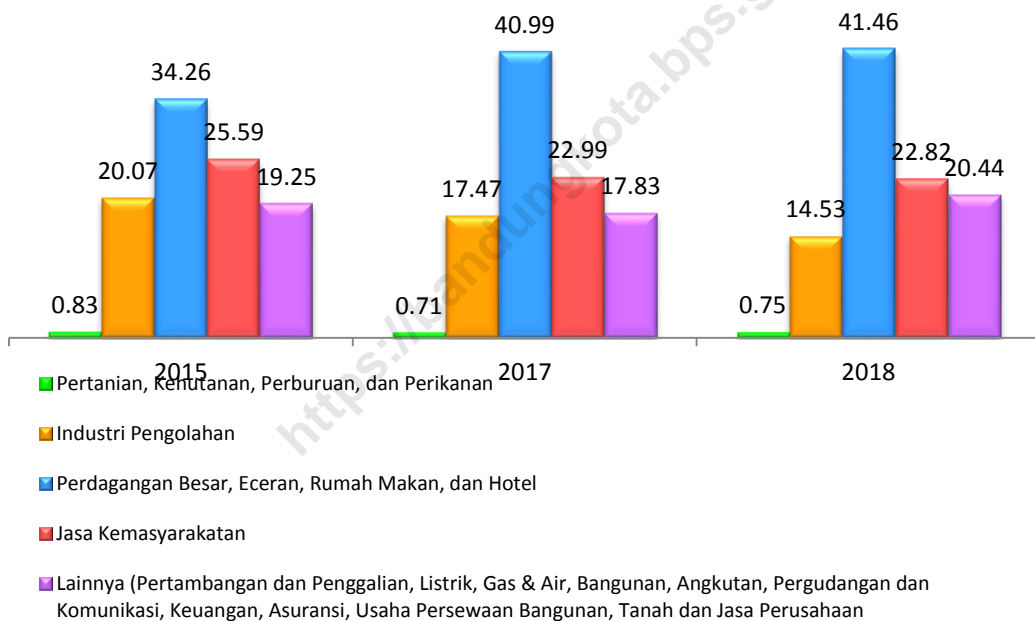
Tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SMA/SMK sederajat dan Diploma/Sarjana menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan dan membuka lapangan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja dari kelompok ini. Saat ini Pemerintah Kota Bandung rutin mengagendakan bursa tenaga kerja jobfair 3-4 kali dalam setahun, program magang ke luar negeri, dan mendorong peningkatan pelaku usaha baru. Pemerintah Kota Bandung rutin mengadakan pelatihan, kursus dan workshop berbasis kewirausahaan dan mendukung tumbuhnya usaha kecil menengah demi meningkatkan keterampilan dan kompetensi pencari kerja. Program Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) Kota Bandung memiliki kegiatan berupa fasilitasi pelatihan, workshop, gelar produk atau pameran, dan temu bisnis, dengan harapan dapat melahirkan wirausaha yang maju dan mandiri menuju Bandung sebagai kota wirausaha berkualitas dan juara.



5.3. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 5 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Industri pengolahan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel; Jasa Kemasyarakatan; dan Lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air, bangunan/konstruksi, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan).

Grafik 12 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Bandung, 2015-2018 (persen)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2018

Berdasarkan Grafik 14 dapat diketahui bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sejak tahun 2015 hingga 2018 paling banyak terserap pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel. Tahun 2015 mampu menyerap sebesar 34,26 persen dari seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2017 naik 6,73 poin menjadi 40,99 persen, dan pada tahun 2018 lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah



makan, dan hotel naik lagi 0,47 poin menjadi 41,46 persen menyerap tenaga kerja Kota Bandung.

Sedangkan lapangan usaha Lainnya pada tahun 2015 sebesar 19,25 persen sempat turun 1,42 poin menjadi 17,83 persen di tahun 2017, tetapi kembali naik di tahun 2018 menjadi 20,44 persen. Penurunan signifikan dapat dilihat pada lapangan usaha industri pengolahan dimana pada tahun 2015 mampu menyerap sebesar 20,07 persen, namun di tahun 2017 turun menjadi 17,47 persen, dan di tahun 2018 turun cukup tajam menjadi 14,53 persen.

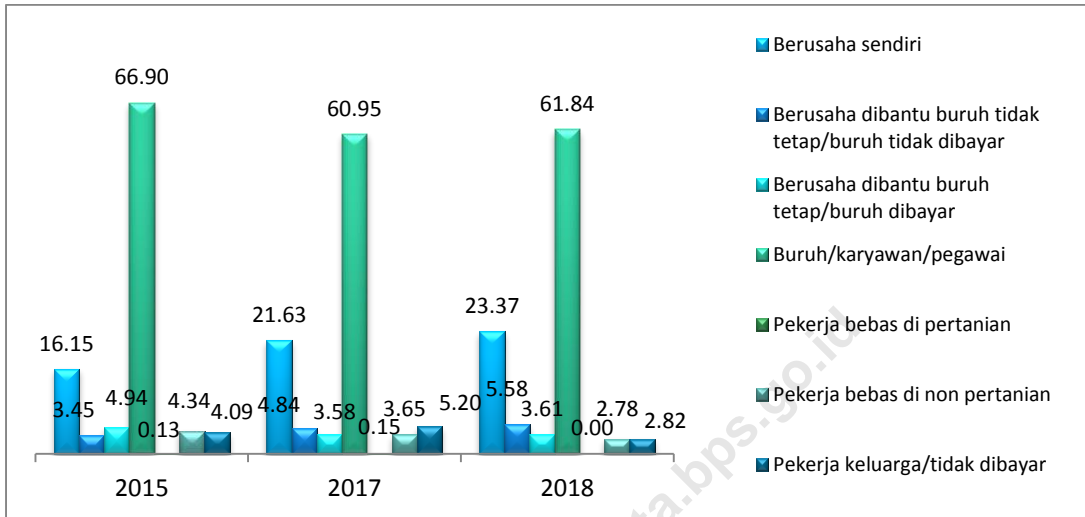
Selain itu, untuk lapangan usaha jasa kemasyarakatan di tahun 2015 mampu menyerap 25,59 persen tenaga kerja Kota Bandung, tapi turun 2,6 poin menjadi 22,99 persen, dan turun kembali di tahun 2018 hanya mampu menyerap 22,82 persen tenaga kerja Kota Bandung.

Lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan menyerap paling sedikit tenaga kerja dibandingkan lapangan usaha lain karena lahan pertanian di Kota Bandung sudah sangat sedikit, seiring pesatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman dan usaha. Tahun 2015 saja lapangan usaha pertanian hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 0,83 persen, turun di tahun 2017 menjadi 0,71 persen, dan sempat naik di tahun 2018 sebesar 0,04 poin menjadi 0,75 persen. Kenaikan ini dapat disebabkan penggalakan program urban farming yang gencar dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Jika dilihat berdasarkan status pekerjaannya, penduduk Kota Bandung usia 15 tahun ke atas yang bekerja dapat dikelompokkan menjadi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.



Grafik 13 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama, 2018 (persen)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat, 2018

Selama periode Agustus 2015 hingga Agustus 2018 persentase penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan mendominasi dibandingkan status pekerjaan yang lain. Pada tahun 2015 yang berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 66,90 persen, turun 5,95 poin di tahun 2017 menjadi 60,95 persen, dan naik kembali menjadi 61,84 persen di tahun 2018.

Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang berusaha sendiri cenderung naik, pada tahun 2015 sebesar 16,15 persen, naik 5,48 poin menjadi 21,63 persen di tahun 2017, dan di tahun 2018 naik kembali menjadi sebesar 23,37 persen. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar tahun 2015 sebesar 4,94 persen, turun di tahun 2017 menjadi sebesar 3,58 persen, dan naik menjadi 3,61 persen di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2015 pengusaha yang dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar adalah sebesar 3,45 persen, naik di tahun 2017 menjadi sebesar 4,84 persen, dan di tahun 2018 menjadi sebesar 5,58 persen.

Pada penduduk di atas 15 tahun yang bekerja bebas di pertanian dan non pertanian cenderung menurun. Untuk pekerja bebas non pertanian tahun 2015 sebesar 4,34 persen,





dan tahun 2017 turun menjadi 3,65 persen, dan di tahun 2018 turun menjadi 2,78 persen. Begitupun dengan pekerja bebas non pertanian. Sedangkan untuk pekerja keluarga atau tidak dibayar di tahun 2015 sebesar 4,09 persen, naik di tahun 2017 sebesar 5,20 persen, dan turun menjadi 2,82 persen di tahun 2018.

Dari Grafik 15 dapat diketahui bahwa terjadi pergeseran perubahan status pekerjaan dari pekerja keluarga dan pekerja bebas menjadi berusaha sendiri dan buruh/karyawan, dimana penduduk yang terikat sebagai pekerja keluarga mencari kemandirian dalam berusaha dengan menjadi bekerja usaha sendiri atau menjadi buruh/karyawan.

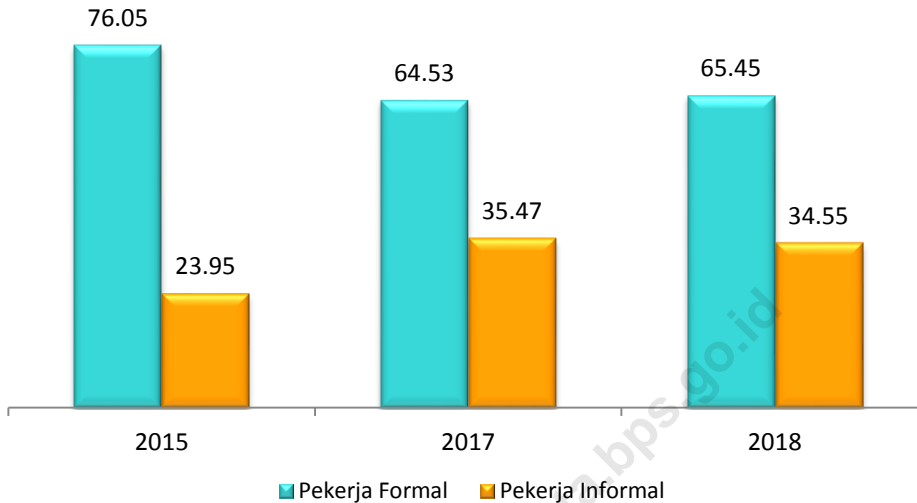
5.4. Sektor Formal dan Sektor Informal

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*).

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai "karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.



Grafik 14 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Kegiatan Formal dan Informal di Kota Bandung, 2015 – 2018



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat, 2018

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) berusaha sendiri informal dan (2) pekerja upahan informal yang dipekerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008).

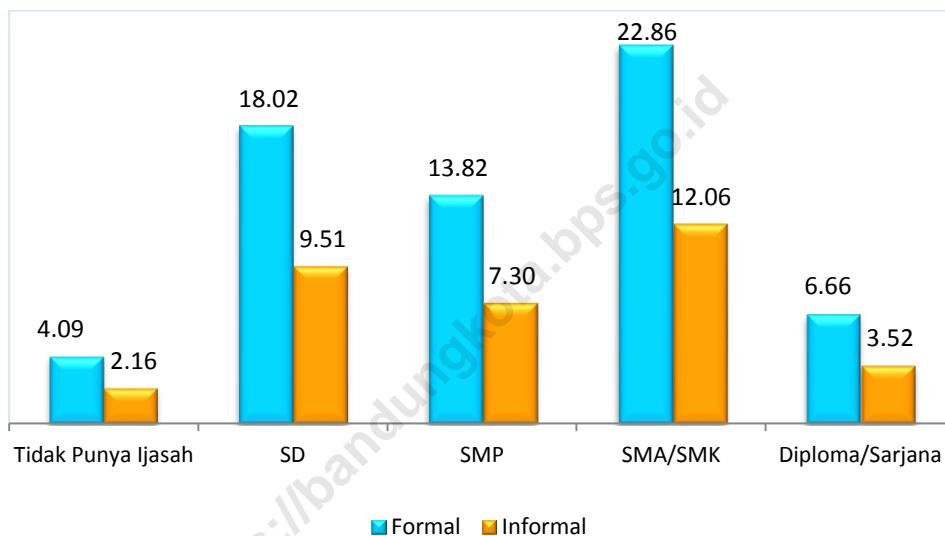
Dari tabel di atas, penduduk Kota Bandung yang bekerja di sektor formal persentasenya lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Pada tahun 2015 penduduk yang bekerja di sektor formal adalah sebesar 76,05 persen, tahun 2017 sebesar 64,53 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 65,45 persen dari total penduduk Kota Bandung usia 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu sebagai pekerja formal.





Pada tahun 2015, penduduk yang bekerja di sektor informal sebesar 23,95 persen, naik 11,52 poin menjadi 35,47 persen di tahun 2017, dan tahun 2018 persentase pekerja informal Kota Bandung sebesar 34,55 persen.

Grafik 15 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja sebagai Pekerja Formal dan Informal menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Bandung, 2015 – 2018 (persen)



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat, 2018

Keterlibatan penduduk dalam dunia pekerjaan cenderung dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan memiliki kecenderungan seseorang untuk bekerja pada sektor formal. Seperti pada Grafik 17 bahwa penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja formal dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan Diploma/Sarjana ke atas lebih tinggi persentasenya dibandingkan yang bekerja di sektor non formal sebesar 6,66 persen, sedangkan yang bekerja di sektor non formal sebesar 3,52 persen.

Penduduk yang berpendidikan SMA/SMK sederajat mendominasi penyerapan tenaga kerja di sektor formal sebesar 22,86 persen sedangkan sektor non formal sebesar 12,06 persen. Namun penduduk usia di atas 15 tahun dengan pendidikan tertinggi SD dan SMP menempati porsi cukup besar untuk pekerja di sektor non formal, dimana untuk

Ketenagakerjaan



pendidikan tertinggi SD sebesar 9,51 persen dan pendidikan tertinggi SMP sederajat sebesar 7,30 persen. Sedangkan penduduk yang tidak memiliki ijazah bekerja di sektor formal sebesar 4,09 persen dan informal sebesar 2,16 persen dari total penduduk Kota Bandung usia di atas 15 tahun yang bekerja.

<https://bandungkota.bps.go.id>



Bab VI PERUMAHAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok disamping kebutuhan pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu keadaan perumahan dan lingkungannya dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga diantaranya dapat dilihat dari kualitas material yang mencakup jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan. Untuk melihat bagaimana kondisi suatu rumah dapat dilihat dari luas lantai yang cukup memadai sehingga dapat memberikan kenyamanan serta udara Segar bagi pemiliknya. Di samping itu dilihat pula fasilitas fasilitas lain yang berkaitan dengan sarana sarana kesehatan seperti sumber air minum, jamban/kaskus, serta sumber penerangan yang digunakan.

Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Menurut Undang undang no 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Rumah sendiri memiliki arti sebagai tempat untuk melepas lelah, beristirahat setelah penat melaksanakan kewajiban sehari-hari, sebagai tempat bergaul dengan keluarga, sebagai tempat untuk melindungi diri dari bahaya, sebagai tempat menyimpan kekayaan (Azwar,1996).



6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Menurut Departemen Kesehatan RI, rumah sehat merupakan bangunan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumah sehat adalah bangunan tempat berlindung dan beristirahat yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan social sehingga seluruh anggota keluarga dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Ada beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Data hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa di Kota Bandung, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 99,39 persen. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 99,2 persen.

Tabel 13 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2017 dan 2018

Indikator	Satuan	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Lantai bukan tanah	%	99,61	99,39
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes	%	99,67	98,32
Dinding terluas tembok dan kayu	%	98,85	99,04
Rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m ²	%	60,88	67,87

Sumber: Statistik Perumahan Jawa Barat 2017-2018 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017-2018

Selain itu, indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Berdasarkan hasil Susenas 2018, rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes di Kota Bandung mencapai 99,39 persen. Rumah tinggal di Kota Bandung sebagian besar telah berdinding tembok dan kayu, yaitu mencakup 99,04 persen.

Berkaitan dengan rumah sehat, WHO (Badan Kesehatan Dunia) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan rumah sehat jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² oleh karena data hasil susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa di Kota Bandung mengalami peningkatan rata rata luas lantai perkapita dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018 terdapat 67,87 persen rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita diatas 10 m².

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah kondisi fisik, kimia, dan biologis di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Persyaratan kesehatan perumahan dan pemukiman serta persyaratan rumah itu sendiri sangat diperlukan karena pembangunan perumahan berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat (Sanropie, 1992).

Adapun persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan pemukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) no 829/Menkes/SK/VII/1999 sebagai berikut: Lokasi tanah atau bangunan, kualitas udara, kualitas tanah, prasarana dan sarana lingkungan, vector penyakit, penghijauan, bahan bangunan, komponen dan penataan ruangan, pencahayaan, kualitas udara, penyediaan air dan pembuangan limbah. Penyediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam



kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Berdasarkan hasil Susenas 2018 tercatat rumah tangga yang menggunakan air kemasan, isi ulang dan air ledeng sebagai sumber air minum adalah sebanyak 85,31 persen. Ini memperlihatkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 86,89 persen. Selain itu tercatat 93,30 persen rumah tangga di Kota Bandung telah menggunakan air minum bersih.

Untuk penggunaan jamban, tercatat 78,98 persen rumah tangga telah menggunakan jamban sendiri sedangkan 28,89 persennya masih ada yang menggunakan jamban bersama (17,65%), MCK (3,22%), bahkan masih ada yang tidak menggunakan jamban ketika buang air besar sebesar 0,16 persen.

UNICEF menyatakan bahwa sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk, serta minum air yang tidak aman berkontribusi terhadap 88% kematian anak akibat diare di seluruh dunia (Kemenkes RI) dari semua kematian yang berakar pada buruknya kualitas air dan sanitasi, diare merupakan penyebab kematian terbesar.

Tabel 14 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kota Bandung, Tahun 2017 dan 2018 (persen)

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Air Kemasan, isi ulang dan air Ledeng	86,89	85,32
Air Minum Bersih	92,49	93,30
Jamban Sendiri	71,11	78,98
Jamban Sendiri dengan tangki septik	40,90	45,09
Sumber Penerangan Listrik PLN	99,62	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2017-2018

Selain air bersih dan jamban, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting adalah penerangan. Secara umum sumber penerangan yang utama berasal dari listrik baik dari PLN maupun non PLN. Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa 100 persen rumah tangga di Kota Bandung telah menikmati fasilitas penerangan listrik PLN.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Semakin banyak rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Tabel 15 Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2017-2018

Indikator	Satuan	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	%	48,33	57,17
Kontrak/Sewa	%	33,44	28,83
Rumah Dinas/bebas sewa/lainnya	%	18,33	14,00

Sumber: Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat 2017-2018

Berdasarkan hasil Susenas 2018, bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 57,17 persen. Sedangkan tahun 2017 sebesar 48,23 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepemilikan rumah/bangunan di Kota Bandung pada tahun 2018. Sedangkan persentase rumah tangga yang menempati rumahnya secara



kontrak/sewa sebesar 28,83 persen dan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2017. Begitu juga dengan rumah tangga yang menempati rumah dinas/bebas sewa, mengalami penurunan menjadi 14,00 persen dibandingkan tahun 2017.

Meningkatnya persentase rumah tangga yang menempati rumah secara sewa/kontrak dikarenakan sebagian dari mereka menetap hanya untuk sementara. Misal, karena tugas pekerjaan, kuliah/sekolah, ataupun yang lainnya. Namun ada juga yang memang karena kondisi ekonomi yang belum mapan untuk memiliki rumah sendiri dan juga harga rumah yang cukup mahal di ibukota Jawa Barat ini, sehingga mereka memilih untuk kontrak/sewa.

<https://bandungkota.bps.go.id>



BAB VII TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi adalah suatu cara atau usaha untuk melakukan kegiatan konsumsi. Pola konsumsi bisa diartikan sebagai jumlah persentase dari distribusi pendapatan terhadap masing-masing pengeluaran pangan, sandang, jasa-jasa serta rekreasi dan hiburan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

7.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran non makanan (non pangan). Pengeluaran rumah tangga sering digunakan sebagai proksi dari pendapatan rumah tangga. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian,



pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 16 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan menurut Jenis Pengeluaran di Kota Bandung, 2016 – 2018

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp.)			Persentase (%)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Padi-padian	56.223	50.153	58.052	3,36	2,83	2,99
2. Umbi-umbian	6.319	6.004	6.287	0,38	0,38	0,32
3. Ikan	27.434	35.380	38.413	1,64	1,99	1,98
4. Daging	41.429	50.586	47.131	2,47	2,85	2,42
5. Telur dan Susu	40.783	45.387	47.101	2,44	2,56	2,42
6. Sayur-sayuran	33.740	41.976	39.624	2,02	2,37	2,04
7. Kacang-kacangan	16.315	15.255	14.934	0,97	0,86	0,77
8. Buah-buahan	31.667	33.800	42.879	1,89	1,91	2,21
9. Minyak dan lemak	12.126	12.031	12.306	0,72	0,68	0,63
10. Bahan minuman	20.134	20.133	21.149	1,20	1,14	1,09
11. Bumbu-bumbuan	10.288	12.243	12.792	0,61	0,69	0,66
12. Konsumsi lainnya	14.289	15.674	14.345	0,85	0,88	0,74
13. Makanan dan minuman jadi	265.077	313.376	334.017	15,83	17,67	17,18
14. Tembakau dan sirih	76.864	83.664	75.616	4,59	4,72	3,89
Makanan	652.689	735.661	764.646	38,98	41,48	39,34
1. Perumahan	549.214	494.582	577.132	32,80	27,89	29,69
2. Barang dan jasa	235.687	279.782	289.606	14,08	15,78	14,90
3. Pakaian	51.408	48.994	65.069	3,07	2,76	3,35
4. Barang tahan lama	101.539	116.229	133.833	6,06	6,55	6,89
5. Pajak	44.328	53.634	58.752	2,65	3,02	3,02
6. Lainnya	39.464	44.690	54.737	2,36	2,52	2,82
Bukan Makanan	1.021.640	1.037.910	1.179.128	61,02	58,52	60,66
Jumlah	1.674.329	1.773.571	1.943.775	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas Maret, 2016 – 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 16 diketahui pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kota Bandung pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.674.329,- dan terjadi kenaikan sebesar Rp. 99.243,- menjadi Rp. 1.773.571,- pada tahun 2017, sedangkan tahun 2018 naik kembali sebesar Rp. 170.204,-. Pada tahun 2016 dari total pengeluaran, sub kelompok makanan



sebesar Rp. 652.689,- atau 38,98 persen dari seluruh total pengeluaran, sedangkan non makanan sebesar Rp. 1.021.640,- atau 61,02 persen. Pada tahun 2017 pengeluaran sub kelompok makanan sebesar Rp. 735.661,- atau 41,48 persen, sedangkan non makanan sebesar Rp. 1.037.910,- atau 58,52 persen. Selain itu, pada tahun 2018 pengeluaran sub kelompok makanan sebesar Rp. 764.646,- atau 39,34 persen, sedangkan pengeluaran non makanan sebesar Rp. 1.179.128,- (60,66 persen). Pola pengeluaran pada tahun 2016 hingga 2018 cenderung serupa dimana pengeluaran sub kelompok non makanan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran sub kelompok makanan.

Selama kurun waktu 2016 hingga 2017, pengeluaran sub kelompok makanan naik 2,50 persen dari 38,98 persen menjadi 41,48 persen, sedangkan dari tahun 2017 hingga 2018 turun sebesar 2,14 persen menjadi 39,34 persen. Demikian sebaliknya di tahun 2016 hingga 2017 pengeluaran sub kelompok non makanan turun 2,50 persen dari 61,02 persen menjadi 58,52 persen, dan tahun 2018 hingga 2017 pengeluaran sub kelompok non makanan naik sebesar 2,14 persen menjadi 60,66 persen.

Jika memperhatikan jenis pengeluarannya, terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran untuk sub kelompok makanan pada sembilan jenis makanan. Peningkatan pada jenis sub kelompok makanan tertinggi adalah jenis buah-buahan, yaitu naik sebesar 0,30 persen menjadi 2,21 persen dalam kurun waktu setahun tersebut.

Pengeluaran sub kelompok makanan penduduk Kota Bandung untuk jenis makanan dan minuman jadi merupakan porsi tertinggi dibandingkan dengan jenis makanan lainnya, yaitu sebesar 15,83 persen pada tahun 2016, 17,67 persen pada tahun 2017, dan 17,18 persen pada tahun 2018. Sedangkan pengeluaran untuk sub kelompok makanan jenis umbi-umbian merupakan pengeluaran terendah dibandingkan jenis makanan lainnya yaitu sebesar 0,38 persen di tahun 2016, 0,34 persen pada tahun 2017, dan di tahun 2018 sebesar 0,32 persen.

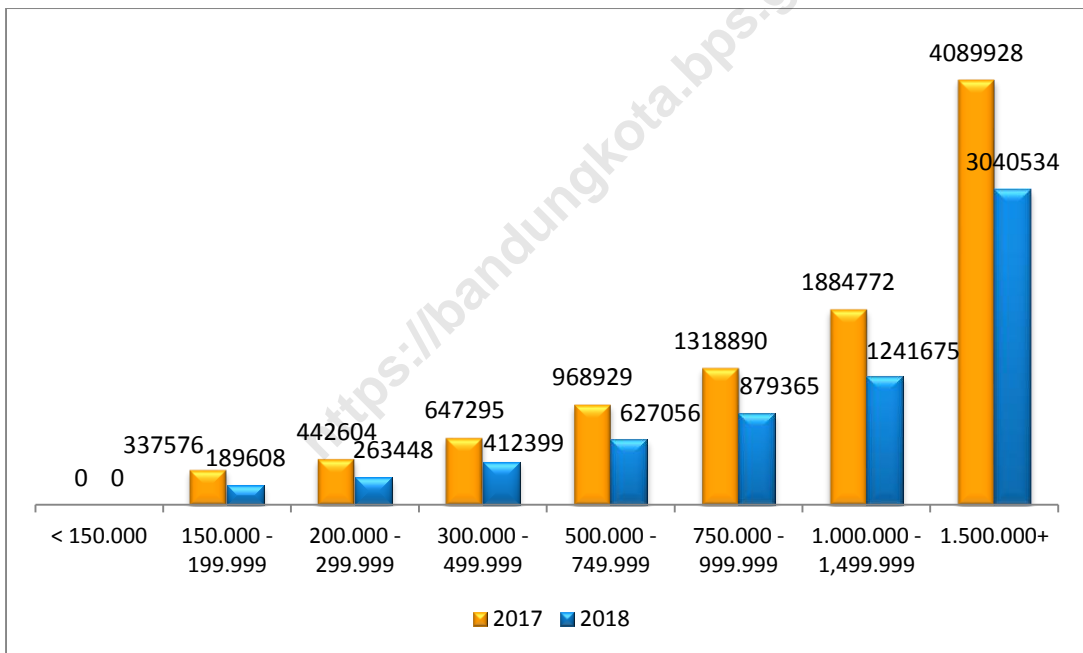
Pengeluaran sub kelompok non makanan tertinggi di Kota Bandung selama kurun waktu 2016 hingga 2018 adalah perumahan. Pada tahun 2016 pengeluaran untuk perumahan sebesar 32,80 persen, tahun 2017 sebesar 27,89 persen, dan tahun 2018



sebesar 29,69 persen. Pengeluaran non makanan berupa pengeluaran perumahan naik tertinggi sebesar 1,80 poin dibandingkan 2017 sebesar 27,89 persen menjadi 29,69 persen.

Perumahan merupakan pengeluaran tertinggi dari seluruh pengeluaran baik pengeluaran makanan maupun non makanan di tahun 2018 yaitu sebesar 29,69 persen dari total pengeluaran sebulan. Sedangkan pengeluaran terendah pada sub kelompok makanan jenis umbi-umbian sebesar 0,32 persen dari total pengeluaran sebulan.

Grafik 16 Rata-Rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung (Rupiah), 2017 - 2018

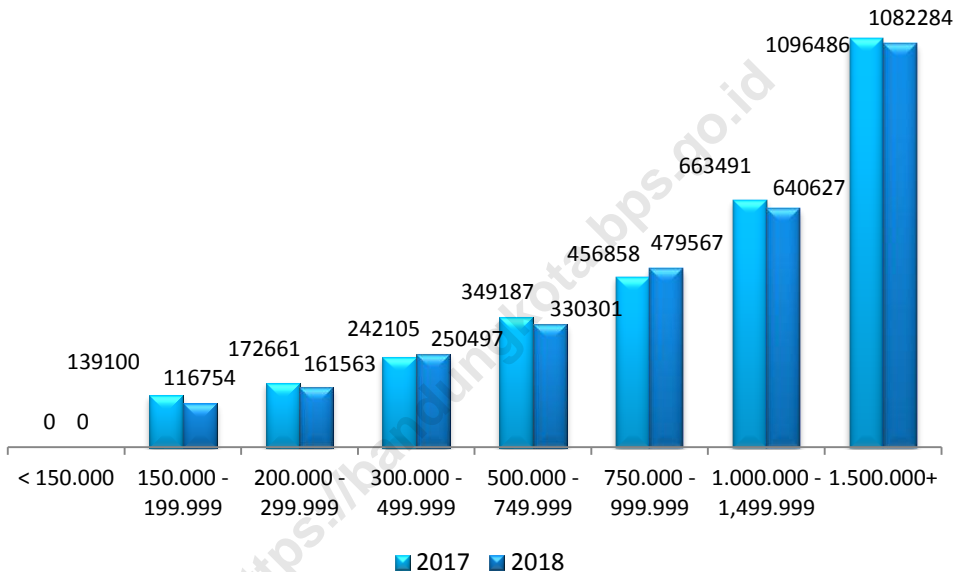


Sumber : Kota Bandung dalam Angka, 2018 - 2019

Secara keseluruhan, pada tahun 2018 rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan mengalami penurunan. Penurunan paling banyak berada pada golongan pengeluaran Rp. 150.000 – Rp. 199.000 sebesar 16,06 persen dibandingkan tahun 2017. Namun jika dirinci berdasarkan golongan pengeluaran, ternyata tidak semua golongan pengeluaran menunjukkan adanya penurunan rata-rata pengeluaran per kapita untuk

makanan. Pada golongan pengeluaran per kapita Rp. 300.000 – Rp. 499.000 mengalami kenaikan rata-rata pengeluaran untuk makanan sebesar 3,47 persen dibandingkan tahun 2017.

Grafik 17 Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Kota Bandung (Rupiah), 2017 - 2018



Sumber : Kota Bandung dalam Angka, 2018 - 2019

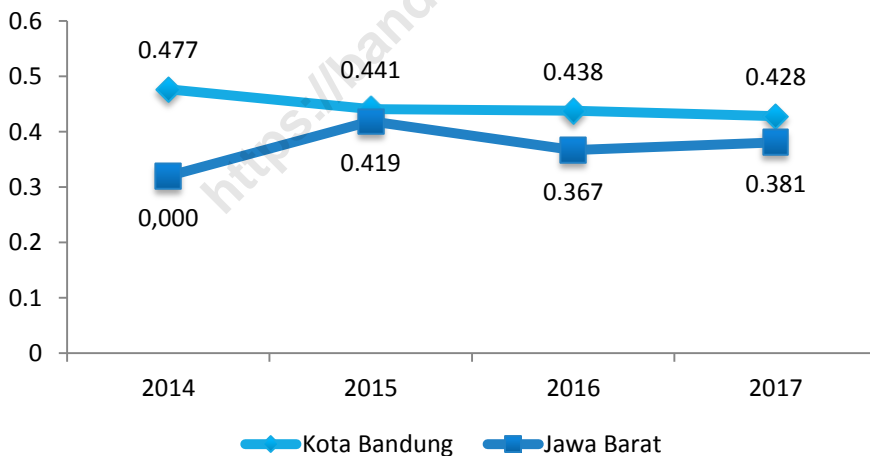
Rata-rata pengeluaran bukan makanan polanya sama dengan rata-rata pengeluaran makanan, dimana untuk seluruh golongan pengeluaran cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Golongan yang mengalami penurunan terbesar yaitu pada golongan pengeluaran Rp. 150.000 – Rp. 199.999, dimana penurunannya mencapai 63,29 persen. Golongan pengeluaran Rp. 200.000 – Rp. 299.999 mengalami penurunan sebesar 62,26 persen. Golongan pengeluaran Rp. 300.000 – Rp. 499.999 mengalami penurunan sebesar 60,04 persen. Dan penurunan terendah yaitu golongan pengeluaran di atas Rp. 1.500.000 yaitu sebesar 34,58 persen atau senilai Rp. 1.035.192 dibandingkan tahun 2017.



Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini atau Gini Rasio nilainya berkisar antara 0 - 1. Nilai angka 0 diartikan pemerataan sempurna, sedangkan nilai angka 1 berarti ketimpangan yang sempurna.

Grafik 18 Gini Ratio Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat, 2014 - 2017



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Barat, 2018

Dari Grafik 20 memperlihatkan bahwa gini rasio Kota Bandung masih di atas gini rasio Provinsi Jawa Barat. Angka gini ratio Kota Bandung pada kurun waktu tahun 2014 - 2017 masih di atas 0,4. Angka gini rasio Provinsi Jawa Barat sebesar 0,3. Artinya tingkat



ketimpangan pendapatan Kota Bandung lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Angka gini rasio Kota Bandung relatif lebih stabil dibandingkan gini rasio Provinsi Jawa Barat. Grafik 20 menunjukkan penurunan, meskipun tidak signifikan. Namun ini merupakan hal yang positif dan perlu ditingkatkan berbagai program pemerintah yang sifatnya memperkecil jurang ketimpangan.

7.2. Konsumsi Energi dan Protein

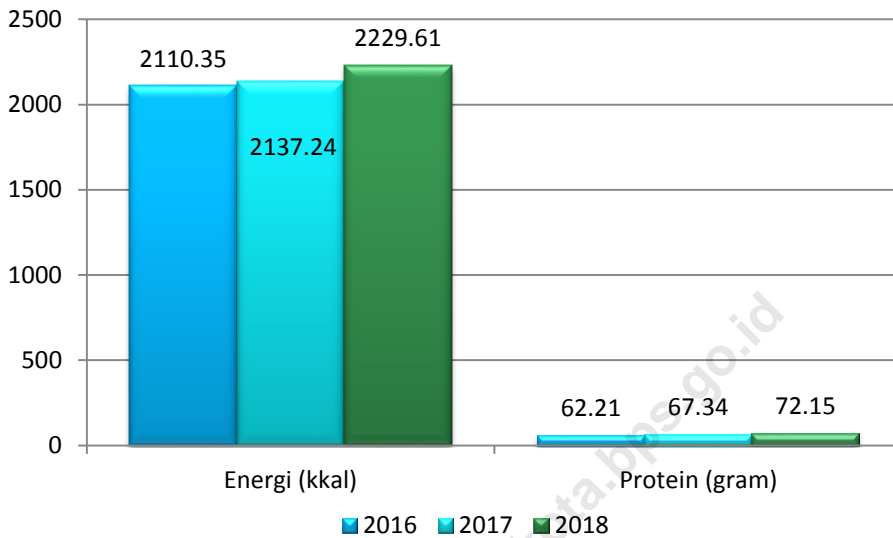
Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut.

Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012). Rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk Kota Bandung per kapita per hari cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 rata-rata konsumsi kalori penduduk Kota Bandung sebesar 2229,61 kkal, naik 4,32 persen dibandingkan tahun 2017 menjadi 2137,24 kkal dan tahun 2016 sebesar 2110,35 kkal. Sedangkan konsumsi protein meningkat 7,14 persen dibandingkan tahun 2017 menjadi 72,15 gram per kapita per hari. Tahun 2017 rata-rata konsumsi protein penduduk Kota Bandung sebesar 67,34 gram, naik 8,25 persen dibandingkan tahun 2016 sebesar 62,21 gram.



Grafik 19 Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari di Kota Bandung, 2016 - 2018



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2016 - 2018

Kondisi tersebut diatas menunjukkan kecukupan akan energi dan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Dimana energi yang diperlukan oleh tubuh manusia adalah 2.100 kkal per kapita per hari dan kebutuhan protein adalah 57 gram per kapita per hari. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk Kota Bandung sudah lebih memperhatikan kebutuhan asupan energi dan protein yang dibutuhkan tubuhnya.



BAB VIII SOSIAL LAINNYA

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya di antaranya adalah akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi, akses masyarakat terhadap layanan usaha, perjalanan wisata dan tingkat keamanan wilayah. Dalam bab ini akan di bahas mengenai akses informasi dan komunikasi serta akses kredit.

Perkembangan teknologi menjadi hal yang tak terpisahkan dalam kehidupan masa kini. Berbagai layanan masyarakat seperti pun sudah beralih dari metode konvensional menjadi digital, seperti jual beli, layanan pembayaran, dan sebagainya. Era digital menjadikan media sosial menjadi ajang sosialisasi dengan dunia luar.

Akses pada teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar (*smartphone*) dan komputer. Harga telepon pintar (*smartphone*) yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

8.1. Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang di Kota Bandung. Nilai PDRB tahun 2018 untuk katagori Informasi dan Komunikasi mencapai 26.688.471,8 juta rupiah. Di tahun 2018 katagori ini memberikan kontribusi kepada pembentukan PDRB Kota Bandung sebesar 10,09 persen atau merupakan katagori berkontribusi terbesar keempat dalam perekonomian Kota Bandung.

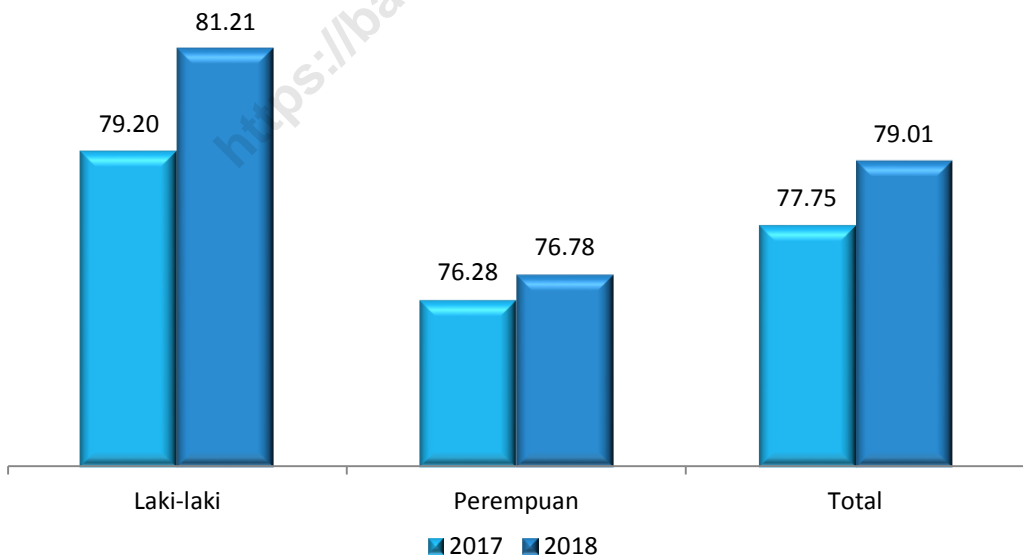
Salah satu alat informasi dan komunikasi yang sangat berkembang adalah telepon seluler. Saat ini telepon seluler telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Pada tahun 2018



di Kota Bandung tercatat 79,01 persen anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas memiliki telepon seluler. Hal ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 di mana kepemilikan telepon seluler pada anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas yang sebesar 77,75 persen.

Persentase kepemilikan telepon seluler bagi anggota rumah tangga laki-laki sedikit lebih besar dibandingkan dengan anggota rumah tangga perempuan. 81,21 persen anggota rumah tangga laki-laki tercatat memiliki telepon seluler. Sedangkan anggota rumah tangga perempuan tercatat sebesar 76,78 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepemilikan telepon seluler di anggota rumah tangga laki-laki jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 79,20 persen. Sedangkan untuk anggota rumah tangga perempuan tidak berubah-ubah secara signifikan.

Grafik 20 Persentase Penduduk 5 tahun ke Atas yang Menguasai/Memiliki Telepon Seluler di Kota Bandung Tahun 2017-2018



Sumber: Susenas Maret 2017-2018, diolah

Selain kepemilikan telepon seluler, penduduk 5 tahun ke atas yang mengakses internet pun semakin meningkat. Dari tabel 17 dapat dilihat bahwa 67,80 persen anggota



rumah tangga berusia 5 tahun ke atas mengakses internet, baik itu berupa akses media sosial, mencari informasi, bermain gim online dan sebagainya.

Anggota rumah tangga laki-laki tercatat memiliki persentase lebih besar dalam mengakses internet, yaitu mencapai 70,24 persen di tahun 2018. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 11,39 persen dibanding tahun 2017 yang sebesar 58,85 persen. Sedangkan anggota rumah tangga perempuan yang mengakses internet mencapai 65,31 persen. Kondisi ini pun menunjukkan adanya peningkatan 8,69 persen dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya yang sebesar 56,62 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Bandung relatif aktif dalam mengakses internet.

Tabel 17 Persentase Anggota Rumah Tangga 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung, 2017-2018

Media	Tahun	
	2017	2018
Laki-laki	58,85	70,24
Perempuan	56,62	65,31
Kota Bandung	57,74	67,80

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung 2017-2018

8.2. Akses Terhadap Layanan Keuangan

Akses terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam perekonomian. Akses layanan keuangan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh bantuan kredit, baik untuk usaha maupun konsumsi. Kredit yang diterima masyarakat untuk usaha menggerakkan perekonomian yaitu dalam bentuk berjalannya sebuah usaha yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan kredit yang bersifat konsumsi akan menggerakkan usaha yang telah ada karena menyebabkan adanya permintaan barang dan



jasa yang akan menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses layanan keuangan di seluruh kalangan masyarakat. Berbagai program digulirkan oleh pemerintah agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan layanan tersebut.

Dari data Susenas tercatat bahwa pada tahun 2018 terdapat 36,1 persen rumah tangga di Kota Bandung yang menerima kredit, baik untuk usaha ataupun bukan. Kredit bank selain KUR diterima oleh 8,36 persen rumah tangga penerima kredit. Persentase ini cukup besar dibandingkan dengan jenis kredit lain yang diterima oleh rumah tangga penerima kredit di Kota Bandung. Kredit ini merupakan kredit dari bank yang didapat oleh masyarakat dengan mengajukan sendiri ke bank dan bukan merupakan program pemerintah.

Dari data Susenas Maret 2018 tercatat terdapat 36,1 persen rumah tangga penerima kredit. KUR merupakan jenis kredit kedua terbesar yang diterima oleh rumah tangga. KUR diterima oleh 5,51 persen rumah tangga penerima kredit di Kota Bandung. Persentase ini naik dari tahun 2017 yang sebesar 3,75 persen. Kondisi ini sedikit berbeda dengan tahun 2017. Di tahun 2017 program KUR adalah adalah program kredit yang diterima terbesar keempat yang diterima oleh rumah tangga di Kota Bandung.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Sektor produktif yang diharapkan dapat memanfaatkan antara lain pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Bantuan keuangan untuk usaha lain yang diberikan pemerintah adalah bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE/KUB). KUBE/KUB adalah program pemerintah yang mendorong pembentukan kelompok usaha untuk menjalankan kegiatan produktif. Kelompok ini dibentuk dari orang-orang/keluarga-keluarga kurang mampu/penerima manfaat program perlindungan sosial. keluarga PKH yang mengajukan proposal pembiayaan berkelompok. Kementerian terkait kemudia akan menyeleksi proposal usaha kelompok

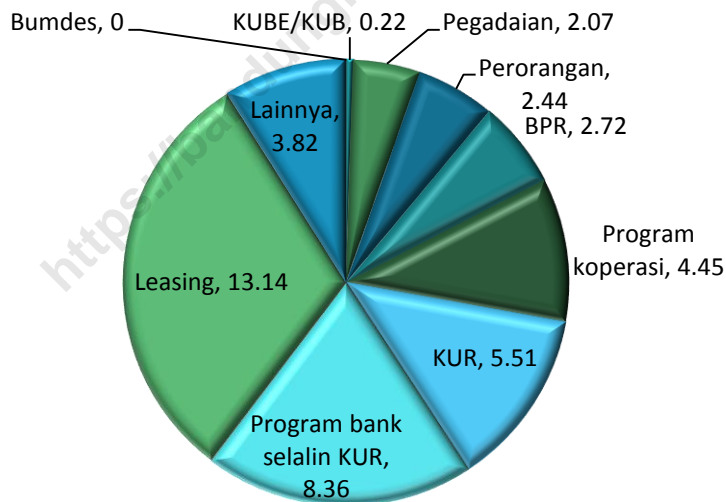




tersebut dan kemudian menyalurkan bantuan usaha untuk setiap kelompok yang terpilih sebagai penerima bantuan.

Di tahun 2018 KUBE diterima oleh 0,22 persen rumah tangga penerima kredit di Kota Bandung. Jika dibandingkan dengan tahun lalu di mana tidak ada rumah tangga yang menerima proram ini, maka hal ini menunjukkan bahwa program KUBE/KUB mulai dirasakan oleh keluarga kurang mampu di Kota Bandung. Ini berarti di Kota Bandung ada usaha dari keluarga tidak mampu yang dibiayai atau menerima bantuan dari pemerintah untuk menjalankan usahanya.

Grafik 21 Grafik 24 Persentase Jenis Kredit Yang Diterima Oleh Rumah Tangga di Kota Bandung (persen), 2018



Sumber: Susenas Maret 2017-2018, diolah

Di tahun 2018 terdapat 4,45 persen rumah tangga penerima kredit dari koperasi. Persentase ini tidak terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya yang sebesar 4,26 persen. Bila dilihat dari angka tersebut, terlihat peran koperasi belum begitu besar di masyarakat



Kota Bandung sebagai salah satu lembaga ekonomi . Untuk meningkatkan peran koperasi diperlukan evaluasi dan sosialisasi mengenai kinerjanya.

Kredit dari leasing merupakan kredit yang paling banyak diterima oleh rumah tangga penerima kredit di Kota Bandung di tahun 2018. Dari data susenas tahun 2018 tercatat bahwa 13,14 persen kredit yang diterima oleh rumah tangga penerima kredit di kota Bandung adalah kredit dari perusahaan leasing.

Persentase kredit yang diterima dapat menunjukkan seberapa mudah akses kredit di sebuah lembaga ekonomi diperoleh oleh masyarakat. Selain tingkat bunga yang kompetitif, kemudahan untuk memenuhi syarat kredit juga merupakan faktor yang menyebabkan masyarakat memilih kredit tertentu.

<https://bandungkota.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDUNG**

JL. Jendral Gatot Subroto No. 93 Bandung 40273

Telp/Fax: (022) 7305091

Homepage: <http://www.bandungkota.bps.go.id>